

**PENGARUH INVESTASI SWASTA DAN PENGELUARAN PEMERINTAH
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI LAMPUNG
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
TAHUN 2011-2016**



Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh:

RAHMA NOFIYANI

NPM: 1451010091

Program Studi :Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1439 H/ 2018 M**

**PENGARUH INVESTASI SWASTA DAN PENGELUARAN PEMERINTAH
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI LAMPUNG
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
TAHUN 2011-2016**



RAHMA NOFIYANI
NPM: 1451010091

Program Studi :Ekonomi Syari'ah

Pembimbing I : Madnasir, S.E., M.S.I
Pembimbing II : Femei Purnamasari, S.E., M.Si.

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1439 H/ 2018 M

ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Untuk meningkatkan pembangunan nasional, maka harus didukung dengan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara tepat. Keberhasilan tidak akan terlihat tanpa adanya hasil riil berupa pertumbuhan dari sesuatu yang dibangun oleh pemerintah di bidang ekonomi, begitu juga tanpa pertumbuhan ekonomi maka pembangunan suatu daerah tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah adakah pengaruh investasi swasta (PMA) dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Lampung tahun 2011-2016, serta bagaimana pertumbuhan ekonomi di provinsi Lampung dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh investasi swasta dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Lampung dan mengetahui pertumbuhan ekonomi di provinsi Lampung dalam perspektif ekonomi Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data sekunder dalam tahun 2011-2016. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi untuk data investasi swasta dan pengeluaran pemerintah yang diambil dari data yang bersumber pada Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Lampung. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan regresi linier berganda yang diolah dengan program SPSS.

Berdasarkan hasil uji signifikan (uji t) pada variabel investasi swasta tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Lampung, karena pada periode tersebut mengalami penurunan nilai tukar mata uang asing, yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Penurunan nilai tukar akan mengurangi investasi. Ketika terjadi depresiasi nilai tukar rupiah maka nilai riil keuntungan yang akan diperoleh akan berkurang sehingga menurunkan tingkat investasi. Sedangkan pada variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Lampung, dimana pembangunan suatu daerah merupakan suatu bentuk pengeluaran pemerintah sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Menurut perspektif ekonomi islam pertumbuhan ekonomi tidak lepas dari konsep keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan bagi setiap individu pada seluruh generasi, menghapus riba dan mewajibkan zakat. Pengukuran pertumbuhan ekonomi dalam ekonomi islam sama dengan ekonomi konvensional, namun dalam islam ada unsur tambahannya yaitu zakat. Agar pertumbuhan ekonomi dapat mensejahterakan dunia dan akhirat.

Kata Kunci : Investasi Swasta (PMA), Pengeluaran Pemerintah, dan Pertumbuhan Ekonomi, Provinsi Lampung.



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Sekretariat : Jl. Letkol. H. Endero Suratmin, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Sukarama, Bandar Lampung

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PENGARUH INVESTASI SWASTA DAN
PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI LAMPUNG
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TAHUN 2011-
2016**

Nama Mahasiswa : **Rahma Nofiyani**
NPM : **1451010091**
Program Studi : **Ekonomi Syariah**
Fakultas : **Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Madnasir, S.E., M.S.I.

NIP. 197504242002121001

Pembimbing II

Femei Purnamasari, S.E., M.S.I.

NIP. 198405212015032004

Mengetahui

Ketua Prodi Ekonomi Syariah

Madnasir, S.E., M.S.I.

NIP. 197504242002121001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endero Suratmin Sukarame 1 Telp. (0721) 703260 Bandar Lampung 35131

PENGESAHAN

**Judul Skripsi : Pengaruh Investasi Swasta Dan Pengeluaran Pemerintah
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif
Ekonomi Islam Tahun 2011-2016. Disusun oleh : Rahma NofiYani NPM:
1451010091 Program Studi : Ekonomi Syariah telah diajukan dalam sidang
munaqosah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal : Selasa / 18
Desember 2018.**

TIM MUNAQOSYAH

Ketua Sidang : Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I

Sekretaris Sidang : Gustika Nurmalia, M.EK

Penguji I : Dr. Moh Bahrudin, M.Ag

Penguji II : Femei Purnamasari, S.E., M.Si

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Dr. Moh. Bahrudin, M.Ag
NIP.195808241989031003**



MOTTO

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٦١﴾

Artinya: dan Barangsiapa yang berjihad, Maka Sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.



PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kehadiran Allah SWT telah memberikan kasih sayang serta rahmat-Nya, memberikan kemudahan kepada penulis, shalawat beriringan salam selalu penulis sampaikan kepada tokoh panutan alam Nabi Muhammad SAW. Dari hati penulis yang paling dalam skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orangtuaku tersayang, Papa saya Alm. Ismedjon dan Mama saya Sarminah yang saya hormati dan saya banggakan. Yang tak pernah berhenti mendoakan dan mendukungku untuk mengejar cita-cita, dan senantiasa memberikan kesabaran dan kasih sayang yang tulus, terima kasih banyak.
2. Uniku Iis Eka Safitri, S.pd, Abangku Rio Ifandri, dan Adikku Bintang Bahril Ilmi, serta Kakak ipar Deri Rusandi dan Keponakanku Adzra dan Adzkia beserta keluarga besar dan orang yang selalu sayang, yang selalu menyemangati baik dalam keadaan susah maupun senang dan memotivasiku untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
3. Almamaterku tercinta tempat saya menimba ilmu yaitu UIN Raden Intan Lampung. Khususnya kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syari'ah tempat penulis menuntut ilmu.
4. Seluruh sahabat seperjuangan yang telah mendampingiku selama ini, Novita Sari, Eka Susiatun, Etika Dewi Puja Lestari, Desi Yanti, Uci Ristiani, Siti Ramadiyanti, Eriska Nur Oktabriani, Rizka Hendriyani, Rifka Audinasari, Risa Andriani, Een Yuningsih, Dewi Eva Maria Ningsih, terima kasih atas rasa persaudaraan dan canda tawa yang kalian berikan selama ini.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Rahma NofiYani, dengan nama kecil opi, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 21 November 1995. Penulis merupakan anak ketiga dari pasangan ayahanda Alm. Ismedjon dan ibunda Sarminah. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu TK Aisyiyah pada tahun 2002, SD Negeri 4 Sukajawa Tanjung Karang Barat pada tahun 2008, lalu melanjutkan pendidikan ke MTS Negeri 1 Bandar Lampung pada tahun 2011, setelah itu melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 3 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2014.

Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syari'ah, di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung melalui Seleksi Berkas Masuk Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (SBMPTN) pada tahun 2014. Pada tahun 2017 penulis menyelesaikan rangkaian tugas akhir, yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sumber Sari, Kecamatan Sragi, Kabupaten Lampung Selatan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Pengaruh Investasi Swasta dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2011-2016** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada program studi Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammas SAW sebagai suri tauladan bagi seluruh umat.

Skripsi ini ditulis merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi pendidikan program strata satu (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE). Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki, dan tanpa bantuan dari berbagai pihak maka skripsi ini tidak akan terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Moh. Bahrudin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswa.
2. Madnasir, S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan dan Deki Firmansyah, M.Si selaku sekretaris jurusan Ekonomi Syari'ah yang senantiasa sabar dalam

memberikan arahan serta motivasi kepada penulis hingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

3. Madnasir, S.E., M.Si dan Femei Purnamasari, S.E., M.Si. yang merupakan pembimbing I dan pembimbing II yang telah tulus meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan benar.
4. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu, pengalaman, pelajaran kepada penulis selama proses perkuliahan.
5. Seluruh staf akademik dan pegawai perpustakaan yang telah memberikan pelayanan yang baik dan memberikan informasi serta sumber referensi kepada penulis.

Bandar Lampung, 02 November 2018

Penulis

Rahma NofiYani
NPM. 1451010091

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------------|--------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| MOTTO | v |
| PERSEMBAHAN..... | vi |
| RIWAYAT HIDUP | vii |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| DAFTAR TABEL | xv |
| DAFTAR GAMBAR..... | xvii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xviii |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|--|----|
| A. Penegasan Judul | 1 |
| B. Alasan Memilih Judul | 3 |
| C. Latar Belakang..... | 4 |
| D. Batasan Masalah..... | 14 |
| E. Rumusan Masalah | 14 |
| F. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 14 |

BAB II LANDASAN TEORI

| | |
|--|-----------|
| A. Pertumbuhan Ekonomi | 17 |
| 1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi..... | 17 |
| 2. Teori Pertumbuhan Ekonomi..... | 19 |
| 3. Produk Domestik Regional Bruto | 23 |
| 4. Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi dalam Pandangan Ekonomi Islam | 25 |
| B. Investasi Swasta..... | 38 |

| | |
|---|-----------|
| 1. Pengertian Investasi | 38 |
| 2. Tujuan Investasi | 39 |
| 3. Teori Investasi | 40 |
| 4. Jenis-jenis Investasi | 41 |
| 5. Penanaman Modal Asing | 42 |
| 6. Hubungan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi..... | 43 |
| C. Pengeluaran Pemerintah | 44 |
| 1. Pengertian Pengeluaran Pemerintah | 44 |
| 2. Teori Pengeluaran Pemerintah..... | 48 |
| 3. Hubungan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi | 50 |
| D. Kajian Pustaka | 51 |
| E. Kerangka Pemikiran..... | 53 |
| F. Hipotesis | 55 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis dan Sifat Penelitian | 58 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 58 |
| 2. Sifat Penelitian | 59 |
| B. Sumber Data | 59 |
| C. Metode Pengumpulan Data | 61 |
| D. Populasi dan Sampel | 61 |
| 1. Populasi | 61 |
| 2. Sampel..... | 62 |
| E. Definisi Operasional Penelitian..... | 63 |
| 1. Variabel Dependen (Y) | 63 |
| 2. Variabel Independen (X)..... | 63 |
| F. Metode Analisis Data | 64 |
| 1. Uji Asumsi Klasik..... | 65 |
| 2. Uji Hipotesis | 67 |
| 3. Koefisien Determinasi..... | 68 |

| | |
|--------------------------------------|----|
| 4. Uji Regresi Linier Berganda | 69 |
|--------------------------------------|----|

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

| | |
|--|-----------|
| A. Deskripsi Objek Penelitian..... | 70 |
| 1. Sejarah Singkat Provinsi Lampung..... | 70 |
| 2. Geografi Provinsi Lampung | 72 |
| 3. Administrasi Pemerintah | 74 |
| B. Gambaran Hasil Penelitian | 76 |
| 1. Investasi Swasta (PMA) Provinsi Lampung | 76 |
| 2. Pengeluaran Pemerintah Provinsi Lampung | 77 |
| 3. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung | 78 |
| C. Analisis Data | 79 |
| 1. Uji Asumsi Klasik | 79 |
| D. Hasil Penelitian..... | 84 |
| 1. Uji Parsial (Uji T)..... | 84 |
| 2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)..... | 85 |
| 3. Uji Koefisien Determinasi | 86 |
| 4. Uji Analisis Regresi Linier Berganda | 87 |
| E. Pembahasan | 89 |
| 1. Pengaruh Investasi Swasta dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2011-2016 Secara Parsial | 89 |
| a. Pengaruh Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung Tahun 2011-2016 | 90 |
| b. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung Tahun 2011-2016 | 92 |
| 2. Pengaruh Investasi Swasta dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2011-2016 Secara Simultan | 95 |
| 3. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2011-2016 dalam Perspektif Ekonomi Islam | 96 |

BAB V PENUTUP

| | |
|----------------------------|------------|
| A. Kesimpulan | 103 |
| B. Saran | 104 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

| | | |
|------------|-------------------------------|----|
| Gambar 2.1 | Kerangka Berfikir | 55 |
| Gambar 4.1 | Uji Heteroskedastisitas | 81 |



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Berita Acara Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung
- Lampiran 3 : Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Lampung (Persen) 2011-2015
- Lampiran 4 : Realisasi Investasi Penanaman Modal Luar Negeri Provinsi Lampung (Milyar Rupiah) Tahun 2011-2016
- Lampiran 5 : Realisasi Pengeluaran (belanja) Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2011-2016
- Lampiran 6 : Uji Normalitas
- Lampiran 7 : Uji Heteroskedastisitas
- Lampiran 8 : Uji Multikolinearitas
- Lampiran 9 : Uji Autokorelasi
- Lampiran 10 : Hasil Uji T
- Lampiran 11 : Hasil Uji F
- Lampiran 12 : Hasil Pengujian Adjusted R square
- Lampiran 13 : Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
- Lampiran 14 : Jumlah Penduduk Provinsi Lampung tahun 2011-2016
- Lampiran 15 : Daftar Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar

DAFTAR TABEL

| | | |
|------------|---|----|
| Tabel 1.1 | Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Lampung (Persen) 2011-2015..... | 7 |
| Tabel 1.2 | Realisasi Investasi Penanaman Modal Luar Negeri Provinsi Lampung (Milyar Rupiah) Tahun 2011-2016 | 10 |
| Tabel 1.3 | Realisasi Pengeluaran (belanja) Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2011-2016 | 11 |
| Tabel 3.1 | Daftar Operasional Variabel | 64 |
| Tabel 4.1 | Nama-Nama Kabupaten dan Ibukotanya di Provinsi Lampung | 75 |
| Tabel 4.2 | Daftar Gubernur Provinsi Lampung Beserta Periode Jabatan..... | 75 |
| Tabel 4.3 | Jumlah Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) tahun 2011-2016..... | 77 |
| Tabel 4.4 | Realisasi Pengeluaran (belanja) Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2011-2016 | 78 |
| Tabel 4.5 | PDRB Provinsi Lampung tahun 2011-2016..... | 79 |
| Tabel 4.6 | Uji Normalitas | 80 |
| Tabel 4.7 | Uji Multikolinearitas | 82 |
| Tabel 4.8 | Uji Autokorelasi | 83 |
| Tabel 4.9 | Hasil Pengujian Uji T | 85 |
| Tabel 4.10 | Uji Simultan (Uji F)..... | 86 |
| Tabel 4.11 | Hasil Pengujian Adjusted R Square | 87 |
| Tabel 4.12 | Hasil Analisis Regresi Linier Berganda | 88 |

| | | |
|------------|---|----|
| Tabel 4.13 | Jumlah Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) Tahun 2011-2016 | 90 |
| Tabel 4.14 | Realisasi Pengeluaran (belanja) Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2011-2016 | 94 |
| Tabel 4.15 | Jumlah Penduduk Provinsi Lampung tahun 2011-2016 | 97 |



LAMPIRAN 3

Tabel 1.1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Lampung
(Persen) 2011-2015

| Kabupaten/Kota | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. Lampung Barat | 6,67 | 6,37 | 6,87 | 5,56 | 5,32 | 5,01 |
| 2. Tanggamus | 5,87 | 9,19 | 6,76 | 5,90 | 5,50 | 5,18 |
| 3. Lampung Selatan | 5,81` | 5,96 | 6,41 | 5,80 | 5,38 | 5,22 |
| 4. Lampung Timur | 5,57 | 4,24 | 8,96 | 2,87 | 4,58 | 4,20 |
| 5. Lampung Tengah | 6,02 | 5,95 | 6,46 | 5,68 | 5,38 | 5,61 |
| 6. Lampung Utara | 5,38 | 5,64 | 6,46 | 5,80 | 5,43 | 5,10 |
| 7. Way Kanan | 5,31 | 5,55 | 5,28 | 5,67 | 5,27 | 5,14 |
| 8. Tulang Bawang | 5,24 | 5,29 | 6,75 | 5,54 | 5,02 | 5,42 |
| 9. Pesawaran | 5,52 | 5,87 | 6,20 | 5,59 | 5,03 | 5,07 |
| 10. Pringsewu | 6,20 | 6,44 | 6,43 | 5,75 | 5,22 | 5,04 |
| 11. Mesuji | 4,93 | 5,57 | 6,18 | 5,69 | 5,24 | 5,10 |
| 12. Tulang Bawang Barat | 5,03 | 5,75 | 6,37 | 5,50 | 5,35 | 5,27 |
| 13. Pesisir Barat | - | - | 5,54 | 5,10 | 4,94 | 5,31 |
| 14. Bandar Lampung | 6,29 | 6,65 | 6,90 | 6,92 | 6,33 | 6,43 |
| 15. Metro | 6,04 | 6,69 | 6,89 | 6,13 | 5,87 | 5,90 |
| Provinsi Lampung | 6,56 | 6,44 | 5,77 | 5,08 | 5,13 | 5,15 |

Sumber: BPS, indikator makro ekonomi regional provinsi lampung, 2014

LAMPIRAN 4

Tabel 1.2
Realisasi Investasi Penanaman Modal Luar Negeri Provinsi
Lampung (Milyar Rupiah) Tahun 2011-2016

| Tahun | Investasi | |
|-------|---------------------|---------------|
| | PMA (Milyar Rupiah) | Jumlah Proyek |
| 2011 | 731.801.928 | 49 |
| 2012 | 1.063.000.000 | 38 |
| 2013 | 469.000.000 | 123 |
| 2014 | 1.643.000.000 | - |
| 2015 | 3.222.000.000 | 61 |
| 2016 | 1.173.000.000 | 47 |

Sumber: BPS Lampung (data diolah)



LAMPIRAN 5

Tabel 1.3
Realisasi Pengeluaran (belanja) Pemerintah Provinsi Lampung
Tahun 2011-2016

| Tahun | Pengeluaran Pemerintah |
|--------------|-------------------------------|
| 2011 | 2.566.078.806 |
| 2012 | 3.835.996.351,82 |
| 2013 | 3.884.534.953,49 |
| 2014 | 4.454.187.317,37 |
| 2015 | 4.781.202.048,88 |
| 2016 | 5.476.921.595,65 |

Sumber: *Statistik Keuangan Daerah Provinsi Lampung tahun 2011-2016*
(data diolah)



LAMPIRAN 6

Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

| | Unstandardized Residual |
|---------------------------------------|-------------------------|
| N | 6 |
| Normal Parameters ² : Mean | .0000000 |
| Std. Deviation | 4.29510142E6 |
| Most Extreme Differences : Absolute | .270 |
| Positive | .193 |
| Negative | -.270 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | .661 |
| Asymp. Sig. (2 - tailed) | .776 |

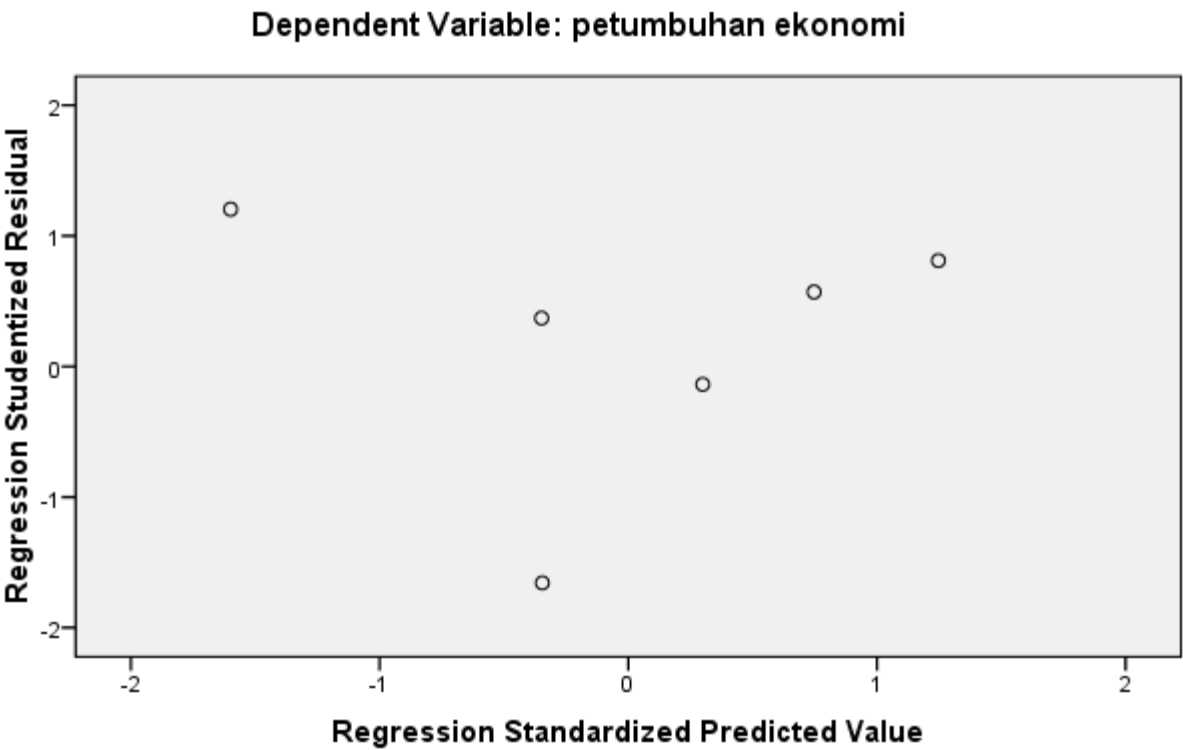
Sumber: data sekunder yang diolah, 2018



LAMPIRAN 7

Uji Heteroskedastisitas

Scatterplot



LAMPIRAN 8

Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

| Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. | Collinearity Statistics | |
|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|-------------------------|-------|
| B | Std. Error | Beta | | | Tolerance | VIF |
| 1.116 | 1.078 | | 10.346 | .002 | | |
| .001 | .003 | .080 | .520 | .639 | .772 | 1.295 |
| .017 | .003 | .931 | 6.039 | .009 | .772 | 1.295 |

Sumber: Data diolah 2018



LAMPIRAN 9

Uji Autokorelasi

Runs Test

| | Unstandardized Residual |
|-------------------------|-------------------------|
| Test Value ^a | 1.37335E6 |
| Cases < Test Value | 3 |
| Cases >= Test Value | 3 |
| Total Cases | 6 |
| Number of Runs | 5 |
| Z | .456 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | .648 |



LAMPIRAN 10

Hasil Uji T

Coefficients^a

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. |
|------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 (Constant) | 1.116E8 | 1.078E7 | | 10.346 | .002 |
| investasi swasta | .001 | .003 | .080 | .520 | .639 |
| pengeluaran pemerintah | .017 | .003 | .931 | 6.039 | .009 |

a. Dependent Variable: pertumbuhan ekonomi



LAMPIRAN 11

Hasil Uji F

ANOVA^b

| Model | | Sum of Squares | Df | Mean Square | F | Sig. |
|-------|------------|----------------|----|-------------|--------|------------------|
| 1 | Regression | 1.582E15 | 2 | 7.912E14 | 25.732 | .01 ^a |
| | Residual | 9.224E13 | 3 | 3.075E13 | | |
| | Total | 1.675E15 | 5 | | | |

a. Predictors: (Constant), pengeluaran pemerintah, investasi swasta

b. Dependent Variable: pertumbuhan ekonomi



LAMPIRAN 12

Hasil Pengujian Adjued R square

| Mode | R | R Square | Adjusted R Square |
|------|------|----------|-------------------|
| 1 | .972 | .945 | .908 |

Sumber : data sekunder diolah 2018



LAMPIRAN 13

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients |
|------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|
| | B | Std. Error | Beta |
| 1 (Constant) | 1.116 | 1.078 | |
| investasi swasta | .001 | .003 | .080 |
| pengeluaran pemerintah | .017 | .003 | .931 |



LAMPIRAN 14

Jumlah Penduduk Provinsi Lampung tahun 2011-2016

| Tahun | Jumlah Penduduk |
|-------|-----------------|
| 2011 | 7.691.007 |
| 2012 | 7.767.312 |
| 2013 | 7.932.132 |
| 2014 | 8.026.191 |
| 2015 | 8.117.268 |
| 2016 | 8.205.141 |

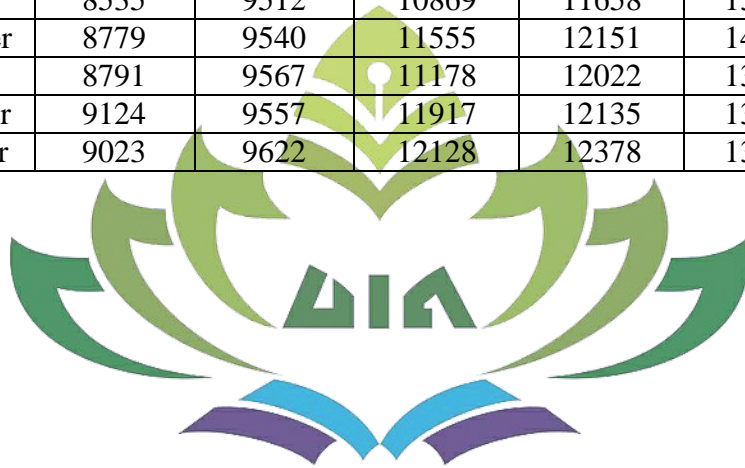
Sumber: BPS Provinsi Lampung



LAMPIRAN 15

Daftar Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar

| Bulan | Tahun | | | | | |
|-----------|-------|------|-------|-------|-------|-------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Januari | 9012 | 8955 | 9650 | 12165 | 12562 | 13777 |
| Februari | 8779 | 9040 | 9619 | 11576 | 12799 | 13328 |
| Maret | 8665 | 9134 | 9670 | 11347 | 13019 | 13210 |
| April | 8531 | 9144 | 9673 | 11474 | 12872 | 13138 |
| Mei | 8494 | 9517 | 9753 | 11553 | 13145 | 13547 |
| Juni | 8554 | 9433 | 9879 | 11909 | 13625 | 13114 |
| Juli | 8465 | 9438 | 10227 | 11533 | 13414 | 13029 |
| Agustus | 8535 | 9512 | 10869 | 11658 | 13957 | 13233 |
| September | 8779 | 9540 | 11555 | 12151 | 14584 | 12933 |
| Oktober | 8791 | 9567 | 11178 | 12022 | 13571 | 12986 |
| November | 9124 | 9557 | 11917 | 12135 | 13771 | 13495 |
| Desember | 9023 | 9622 | 12128 | 12378 | 13726 | 13369 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan gambaran utama pada suatu penelitian karya ilmiah, sehingga penegasan judul dalam penelitian ini dilakukan untuk mempermudah pembaca dalam memahami judul penelitian. Oleh karena itu perlu untuk ditegaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul proposal skripsi yaitu **“Pengaruh Investasi Swasta dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2011-2016”**. Pada bagian ini penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul proposal ini.

1. **Pengaruh** adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.¹
2. **Investasi** adalah pengeluaran atau penanaman modal perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian.²

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (on-line), tersedia di: <https://kbbi.web.id/pengaruh> (18 Januari 2018)

² Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 121.

3. **Pengeluaran (Belanja) Pemerintah** adalah nilai pembelanjaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Pengeluaran untuk menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, pengeluaran yang menyediakan polisi dan tentara, pengeluaran gaji untuk pegawai pemerintah, dan pengeluaran untuk pengembangan infrastruktur dibuat untuk kepentingan masyarakat.³
4. **Pertumbuhan ekonomi** adalah suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam satu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.⁴
5. **Ekonomi Islam** adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah.⁵

Berdasarkan penegasan dari istilah judul penelitian, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud judul ini secara keseluruhan adalah “Pengaruh Investasi Swasta dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung dalam perspektif ekonomi islam tahun 2011-2016”. Penelitian ini bermaksud untuk melihat sejauh mana peningkatan investasi dan pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.

³ Tommy Prio Haryanto, *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011*, (journal unnes 2013),h.151

⁴ Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 9.

⁵P3EI, *Ekonomi Islam*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2011), h. 19

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan memilih dan menetapkan judul ini adalah sebagai berikut :

1. Alasan Objektif

Salah satu tolak ukur dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan dampak nyata dari kebijakan pembangunan yang dilaksanakan. Peran pemerintah sangat penting dalam merencanakan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Salah satunya menghimpun dana untuk keperluan investasi agar pertumbuhan ekonomi dapat meningkat. Menurut Harrod Domar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan investasi-investasi baru dalam stok modal. Seperti penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN), semakin banyak tabungan yang diinvestasikan maka semakin cepat terjadi pertumbuhan ekonomi.

Dalam meningkatkan pembangunan ekonomi terutama di negara yang sedang berkembang dapat dilakukan melalui kebijakan fiskal. Dengan kebijakan fiskal pemerintah dapat mengembangkan sarana dan prasarana untuk kepentingan publik yang nyata, meningkatkan kesejahteraan, dan mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi.

Besarnya penyediaan fasilitas publik ini mempunyai korelasi terhadap besarnya pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah suatu negara menggambarkan suatu pembiayaan terhadap kegiatan pemerintah. Selain itu

pemerintah dapat memperbesar pengeluarannya baik konsumsi maupun investasi dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Maka sudah seharusnya setiap pengeluaran dan belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah termasuk pemerintah provinsi mampu memberikan dampak bagi perekonomian Provinsi Lampung.

2. Alasan Subjektif

Memberikan pengetahuan dan wawasan bagi penulis dan pembaca tentang Pengaruh Investasi Swasta dan Pengeluaran Pemerintah Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Disamping itu pula data dari penelitian yang penulis teliti dapat diperoleh melalui beberapa lembaga atau instansi yang terkait dan juga penelitian yang dilakukan oleh penulis ada relevansinya dengan ilmu yang penulis pelajari di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam.

C. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator keberhasilan kinerja pemerintah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi di setiap negara.⁶

Setiap negara akan berupaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi paling

⁶ Ni Luh Aprilia Kesuma dan I made Suyana Utama, “Analisis Sektor Unggulan dan Pergeseran Pangsa Sektor-Sektor Ekonomi Kabupaten Klungkung” (E-Jurnal EP UNUD, 4(3): 169-179. ISSN: 2303-0178, Universitas Udayana, Bali, 2013). h. 169.

optimal. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas akan membawa manfaat bagi masyarakat luas.⁷

Pertumbuhan ekonomi yang berlaku walaupun terjadi secara berlanjut dalam jangka panjang belum tentu melahirkan pembangunan ekonomi dan peningkatan dalam kesejahteraan (pendapatan) masyarakat. Apabila dalam jangka panjang pertumbuhan ekonomi sama dengan penambahan penduduk, maka perekonomian negara tersebut tidak mengalami perkembangan dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak mengalami kemajuan.⁸

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Untuk meningkatkan pembangunan nasional, maka harus didukung dengan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara tepat. Laju pertumbuhan ekonomi daerah biasanya digunakan untuk menilai seberapa jauh keberhasilan pembangunan daerah dalam periode waktu tertentu.⁹

Berbagai studi telah dilakukan mengapa perekonomian suatu negara mengalami pertumbuhan, baik pertumbuhan positif maupun pertumbuhan negatif. Pada sisi lain analisis keynes berpendapat tentang pentingnya peranan dari pengeluaran agregat ke atas jumlah barang dan jasa yang akan diproduksi oleh sektor perusahaan di dalam menentukan tingkat kegiatan

⁷ Tim Biro Hubungan dan Studi Internasional-Bank Indonesia, *Perekonomian Asia Timur Satu Dekade Setelah Krisis* (Jakarta: Grasindo, 2015), h.57.

⁸ Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan*, Edisi Kedua (Jakarta: Putra Grafika), h.11.

⁹ Robinson Tarigan, *Ekonomi Regional Edisi Revisi*, h.47

ekonomi. Bertambah besar permintaan afektif yang wujud dalam perekonomian, bertambah besar pula tingkat produksi yang akan dicapai oleh sektor perusahaan. Keadaan ini dengan sendirinya akan menyebabkan pertambahan dalam tingkat kegiatan ekonomi, pertambahan penggunaan tenaga kerja dan pertambahan penggunaan faktor-faktor produksi.¹⁰

Keberhasilan tidak akan terlihat tanpa adanya hasil riil berupa pertumbuhan dari sesuatu yang dibangun oleh pemerintah di bidang ekonomi, begitu juga tanpa pertumbuhan ekonomi maka pembangunan suatu daerah tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.

Masalah pertumbuhan ekonomi di suatu daerah tergantung pada banyak faktor, salah satunya adalah kebijakan pemerintah itu sendiri. Ini harus dikenali dan diidentifikasi secara tepat supaya faktor tersebut dapat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi.¹¹ Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui perekonomian suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik secara Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Pertumbuhan ekonomi dicerminkan dari adanya perubahan PDRB dari satu periode ke periode berikutnya, yang merupakan salah satu petunjuk nyata pembangunan suatu daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung yang mencerminkan keberhasilan implementasi kebijakan

¹⁰ Sadono, Op. Cit. h.85

¹¹ Dewi Kurniawati Sunusi, Anderson Kumenaung, Debby Rotinsulu, Analisis Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah Pada Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Sulawesi Utara Tahun 2001-2010, (Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Volume14 no.2-Mei2014)

daerah.¹² Perkembangan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari tabel pertumbuhan perekonomian.

Tabel 1.1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Lampung
(Persen) 2011-2015

| Kabupaten/Kota | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. Lampung Barat | 6,67 | 6,37 | 6,87 | 5,56 | 5,32 | 5,01 |
| 2. Tanggamus | 5,87 | 9,19 | 6,76 | 5,90 | 5,50 | 5,18 |
| 3. Lampung Selatan | 5,81 | 5,96 | 6,41 | 5,80 | 5,38 | 5,22 |
| 4. Lampung Timur | 5,57 | 4,24 | 8,96 | 2,87 | 4,58 | 4,20 |
| 5. Lampung Tengah | 6,02 | 5,95 | 6,46 | 5,68 | 5,38 | 5,61 |
| 6. Lampung Utara | 5,38 | 5,64 | 6,46 | 5,80 | 5,43 | 5,10 |
| 7. Way Kanan | 5,31 | 5,55 | 5,28 | 5,67 | 5,27 | 5,14 |
| 8. Tulang Bawang | 5,24 | 5,29 | 6,75 | 5,54 | 5,02 | 5,42 |
| 9. Pesawaran | 5,52 | 5,87 | 6,20 | 5,59 | 5,03 | 5,07 |
| 10. Pringsewu | 6,20 | 6,44 | 6,43 | 5,75 | 5,22 | 5,04 |
| 11. Mesuji | 4,93 | 5,57 | 6,18 | 5,69 | 5,24 | 5,10 |
| 12. Tulang Bawang Barat | 5,03 | 5,75 | 6,37 | 5,50 | 5,35 | 5,27 |
| 13. Pesisir Barat | - | - | 5,54 | 5,10 | 4,94 | 5,31 |
| 14. Bandar Lampung | 6,29 | 6,65 | 6,90 | 6,92 | 6,33 | 6,43 |
| 15. Metro | 6,04 | 6,69 | 6,89 | 6,13 | 5,87 | 5,90 |
| Provinsi Lampung | 6,56 | 6,44 | 5,77 | 5,08 | 5,13 | 5,15 |

Sumber: BPS, indikator makro ekonomi regional provinsi lampung, 2014

Berdasarkan Tabel 1.1, pada tahun 2011-2015 perekonomian Lampung mengalami penurunan signifikan dan pada tahun 2016 mengalami kenaikan dari tahun 2015. Terlihat pada tahun 2011 sebesar 6,56 persen dan pada tahun 2016 sebesar 5,15 persen. Terlihat pada tabel perekonomian di Provinsi lampung mengalami penurunan sampai tahun 2014, dan pada tahun

¹² Athaillah, Abubakar Hamzah, Raja Masbar, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh", *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Issn 2302-0172 Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Volume 1, No. 3 (Agustus 2013), h.2.

2015 mengalami kenaikan dari tahun 2014 sebesar 0,05 persen dan pada tahun 2016 mengalami kenaikan dari tahun 2015 sebesar 0,02 persen.

Sumber-sumber pembiayaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi juga bisa berasal dari ekspor, bantuan luar negeri, investasi asing dan tabungan domestik.¹³ Investasi tersebut berasal dari dua sumber yaitu penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA). Investasi yang berasal dari dalam negeri maupun asing akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu daerah maupun provinsi.

Pesatnya penanaman modal baik lokal maupun asing disuatu daerah merupakan salah satu indikator bahwa daerah tersebut memiliki sistem perekonomian yang baik, karena didukung oleh kecukupan sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Investasi merupakan salah satu variabel yang penting dalam mendorong sebuah perekonomian.¹⁴

Investasi menjadi penting bagi pertumbuhan ekonomi terkait dengan kontribusi yang diberikannya. Investasi memainkan peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Investasi yang kondusif menjadi syarat mutlak bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan demikian, penting bagi pemerintah daerah untuk menciptakan kondisi lingkungan usaha

¹³ Kuncoro, Mudrajad, *Ekonomi Pembangunan (Teori, Masalah, dan Kebijakan)*, UPP AMP YPKN, Yogyakarta, 1997, h. 215

¹⁴ Nugroho SBM, *Evaluasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi investasi di Indonesia dan implikasi kebijakannya*, jurnal Riptek, Vol. 2, No.1, Tahun 2008, h. 18-21

yang kondusif guna menarik minat investor menanamkan modalnya di daerah baik yang berasal dari dalam dan luar daerah maupun asing. Dengan meningkatnya investasi swasta, diharapkan akan dapat mengatasi keterbatasan pemerintah yang selanjutnya akan semakin mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.¹⁵

Pertumbuhan ekonomi tidak akan terlepas dari peranan para pelaku ekonomi yakni pemerintah yang berperan dengan kebijakan publik dan fiskal. Swasta yang berperan dalam pengembangan investasi serta masyarakat itu sendiri yang dapat berperan sebagai input dari faktor produksi dan jaminan terciptanya pasar dalam perekonomian dan investasi dalam pembangunan. Selain itu pihak swasta dalam perkembangan ekonomi juga memberikan kontribusi positif, yakni dengan melakukan investasi yang biasa di kenal.¹⁶ Berikut ini adalah laju investasi yang ada di Provinsi Lampung dalam kurun waktu lima tahun terakhir:

¹⁵ Siti Aminah, *Analisis Pengaruh Investasi Swasta dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Provinsi Jambi*, (Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol. 4 No. 2, Oktober-Desember 2016),h.120-121

¹⁶ Gabriela Brigita Desire Mosey, Rosalina Koleangan dan Richard Tumilaar, *Pengaruh Investasi Swasta Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2004-2013*, (Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Volume 16 No. 01 Tahun 2016), h.639

Tabel 1.2
Realisasi Investasi Penanaman Modal Luar Negeri Provinsi
Lampung (Milyar Rupiah) Tahun 2011-2016

| Tahun | Investasi | |
|-------|---------------------|---------------|
| | PMA (Milyar Rupiah) | Jumlah Proyek |
| 2011 | 731.801.928 | 49 |
| 2012 | 1.063.000.000 | 38 |
| 2013 | 469.000.000 | 123 |
| 2014 | 1.643.000.000 | - |
| 2015 | 3.222.000.000 | 61 |
| 2016 | 1.173.000.000 | 47 |

Sumber: BPS Lampung (data diolah)

Dari tabel 1.2 diatas dapat dilihat realisasi investasi penanaman modal luar negeri Provinsi Lampung (milyar rupiah) tahun 2011-2016 mengalami fluktuasi. Dari tahun 2011 mengalami kenaikan di tahun 2012 sebesar 331.198.072 dan pada tahun 2013 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 594.000.000 kemudian mengalami kenaikan di tahun 2014 dan 2015 kemudian mengalami penurunan di tahun 2016 dari tahun sebelumnya sebesar 2.049.000.000

Selain itu sebagai tolak ukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga tidak bisa lepas dari peranan pengeluaran pemerintah daerah di sektor layanan publik. Pengeluaran pemerintah daerah dikelompokkan menjadi 2(dua), yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung yang terdapat di dalam belanja daerah. Komponen pengeluaran konsumsi pemerintah bertujuan untuk dapat lebih mendorong perekonomian daerah. Pengeluaran konsumsi pemerintah ini utamanya akan menggerakkan lapangan usaha konstruksi dan lapangan usaha jasa. Idealnya pengeluaran pemerintah diarahkan pada kegiatan yang dapat

merangsang kegiatan investasi dan ekspor. Jika pengeluaran lebih banyak digunakan untuk kegiatan yang bersifat konsumtif, maka sasaran pengembangan ekonomi akan sulit dicapai. Semakin besar pengeluaran pemerintah daerah yang produktif maka semakin memperbesar tingkat perekonomian suatu daerah. Adapun dalam tabel berikut:

Tabel 1.3
Realisasi Pengeluaran (belanja) Pemerintah Provinsi Lampung
Tahun 2011-2016

| Tahun | Pengeluaran Pemerintah |
|--------------|-------------------------------|
| 2011 | 2.566.078.806 |
| 2012 | 3.835.996.351,82 |
| 2013 | 3.884.534.953,49 |
| 2014 | 4.454.187.317,37 |
| 2015 | 4.781.202.048,88 |
| 2016 | 5.476.921.595,65 |

Sumber: *Statistik Keuangan Daerah Provinsi Lampung tahun 2011-2016 (data diolah)*

Berdasarkan tabel 1.3 diatas dapat dilihat realisasi pengeluaran pemerintah Provinsi Lampung selama kurun waktu lima tahun mengalami kenaikan. Total pengeluaran (belanja) pemerintah dengan nilai terendah pada tahun 2011 sebesar Rp. 2.566.078.806 , sedangkan pengeluaran (belanja) pemerintah dengan nilai terbesar pada tahun 2016 sebesar Rp. 5.476.921.595,65

Pengeluaran pemerintah meningkat mencerminkan kebijakan pemerintah. Peran pemerintah sangat diperlukan dalam mengatur ekonomi. Salah satu peran pemerintah dalam mengatur perekonomian adalah dengan

menerapkan kebijakan fiskal dengan mengalokasikan pengeluaran pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah atau Negara memiliki peranan penting dalam perekonomian, pemerintah adalah pemegang amanah dari Allah untuk menjalankan tugas-tugas kolektif dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan serta tata kehidupan yang baik bagi seluruh umat. Dalam Islam pemerintah adalah agen dari Tuhan.¹⁷ Artinya bahwa pemerintah memiliki kebijakan dalam perekonomian, pemerintah dalam Islam memiliki beberapa prinsip dalam kebijakan ekonomi publik, pertama prinsip hakikat kepemilikan, kedua prinsip sumber pengambilan kebijakan atau keputusan, prinsip musyawarah dan prinsip keadilan dan kemaslahatan.¹⁸ Prinsip ini penting untuk diterapkan dalam mewujudkan perekonomian sehingga pertumbuhan ekonomi akan tercapai. Tentu tidak terlepas dari partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Pemerintah yang aktif akan dapat membawa dampak positif bagi pembangunan daerah. Sesuai dengan firman Allah QS An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

¹⁷ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia, Ekonomi Islam, Yogyakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2008, h. 446

¹⁸ <http://kseirsundip.wordpress.com/2012/07/24/peran-pemerintah-dalam-ekonomi-islam/diakses> pada 30 juni 2016

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia dalam bersosial harus berlandaskan pada keadilan, kebaikan dan menjauh dari segala kedzaliman dan arogansi. Adil dan keadilan yang dimaksud adalah berlandaskan ajaran islam dan syariat agama.

Sesuai dengan undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pelimpahan sebagian wewenang pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka pembangunan Nasional Republik Indonesia.¹⁹ Maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus dapat memotivasi masyarakatnya untuk menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang ada pada daerahnya masing-masing agar pembangunan daerah dapat maksimal.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti seberapa besar pengaruh tingkat investasi swasta dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung itu sendiri, adapun judul skripsi ini yakni : **“Pengaruh Investasi Swasta Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2011-2016”**

¹⁹ Undang-undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2004, *Tentang Peraturan Pemerintah Daerah*, pasal 2 ayat 2

D. Batasan Masalah

Untuk memperjelas ruang lingkup masalah yang akan dibahas dan agar penelitian dilaksanakan secara fokus maka terdapat batasan masalah dalam penelitian ini. Fokus masalah dalam penelitian ini diambil dari investasi swasta penanaman modal asing (PMA) dan pengeluaran pemerintah (total dari belanja langsung dan tidak langsung).

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah yang menjadi bahasan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh investasi swasta dan pengeluaran pemerintah secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung tahun 2011-2016?
2. Bagaimana pengaruh investasi swasta dan pengeluaran pemerintah secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung tahun 2011-2016?
3. Bagaimana pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung dalam perspektif ekonomi islam?

F. Tujuan Dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh investasi swasta dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung periode 2011-2016 secara parsial.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh investasi swasta dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung periode 2011-2016 secara simultan.
- c. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung dalam perspektif ekonomi islam.

2. Manfaat

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi akademisi, memberikan hasil pemikiran serta tambahan pengetahuan di bidang Investasi Swasta, Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung dalam perspektif ekonomi islam tahun 2011-2016. Menambah literatur mengenai hal tersebut bagi lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Raden Intan Lampung, khususnya jurusan Ekonomi Islam.
2. Bagi penulis, dapat menambah wawasan mengenai Investasi Swasta, Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung di tinjau dari Perspektif Ekonomi Islam.
3. Bagi pemerintah agar dapat melakukan peningkatan investasi dan pengeluaran pemerintah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung secara menyeluruh.

4. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat umum tentang perekonomian Lampung pada investasi dan pengeluaran pemerintah. Sehingga masyarakat umum mengetahui pengaruh tingkat investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pertumbuhan Ekonomi

1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara maupun suatu daerah menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam suatu daerah. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka akan ada pembangunan ekonomi dimana pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output* perkapita dalam jangka panjang. Tekanannya pada tiga aspek, yaitu: proses, *output* perkapita, dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.¹

Menurut Prof. Simon Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas tersebut

¹ Sadono Sukirno, *Edisi Kedua, Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*, (Jakarta, Kencana, 2006), h. 9.

dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, intitusional dan ideologi terhadap berbagai keadaan yang ada.²

Laju pertumbuhan ekonomi daerah biasanya digunakan untuk menilai seberapa jauh keberhasilan pembangunan daerah dalam periode waktu tertentu. Untuk meningkatkan pembangunan nasional, maka harus didukung dengan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara tepat. Pertumbuhan ekonomi daerah tersebut dapat ditunjukkan oleh kenaikan GDP atau PDRB.

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi terus menerus, usaha untuk menaikkan pendapatan perkapita. Kenaikan pendapatan perkapita harus terus berlangsung dalam jangka panjang dan yang terakhir perbaikan sistem kelembagaan disegala bidang (misalnya ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya). Sistem ini bisa ditinjau dari dua aspek yaitu: aspek perbaikan dibidang organisasi (institusi) dan perbaikan dibidang regulasi baik legal formal maupun informal.³ Dalam hal ini, berarti pembangunan ekonomi merupakan suatu usaha tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita. Dengan demikian, sangat dibutuhkan peran serta masyarakat, pemerintah, dan semua elemen yang terdapat dalam suatu daerah untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan.

² Michael Todaro, *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*, (Jakarta, Erlangga 2000), h.44

³ Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta, STIE YKPN 1999, h. 12.

Sementara itu, dalam Islam pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai *A sustained growth of a right kind of output which can contribute to human welfare*. (Sebuah pertumbuhan produksi atau hasil yang terus menerus dengan cara yang benar yang dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan umat manusia).⁴

Pertumbuhan ekonomi merupakan faktor terpenting dalam pembangunan. Keberhasilan pembangunan suatu negara/daerah diukur berdasarkan tinggi rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi selama periode tertentu.

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi

a. Teori Adam Smith

Orang yang pertama membahas pertumbuhan ekonomi secara sistematis adalah Adam Smith. Mengenai faktor yang menentukan pembangunan, Adam Smith berpendapat bahwa perkembangan penduduk akan mendorong pembangunan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperluas pasar dan perluasan pasar akan meninggikan tingkat spesialisasi dalam perekonomian tersebut. Sebagai akibat dari spesialisasi yang terjadi, maka tingkat kegiatan ekonomi akan bertambah tinggi. Perkembangan spesialisasi dan pembagian pekerjaan di antara tenaga kerja akan

⁴ A. H. M. Sadeq, *Islamic Economic*, (Lahore: Islamic Publication (Pvt) Limited, 1989), h. 24

mempercepat proses pembangunan ekonomi, karena spesialisasi akan meninggikan tingkat produktivitas tenaga kerja dan perkembangan teknologi.⁵

b. Teori Harrod-Domar

Teori Harrod-Domar pada hakikatnya berusaha untuk menunjukkan syarat yang diperlukan agar pertumbuhan yang mantap atau *steady growth*-yang dapat didefinisikan sebagai pertumbuhan yang akan selalu menciptakan penggunaan sepenuhnya barang-barang modal akan selalu berlaku dalam perekonomian. Dalam teori Harrod-Domar pembentukan modal dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kesanggupan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang, maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat.⁶

Teori Harrod-Domar ini mempunyai beberapa asumsi klasik yaitu:

- 1) Barang modal telah mencapai kapasitas penuh (*full employment*).
- 2) Tabungan adalah proporsional terhadap pendapatan.
- 3) Rasio antara modal dan produksi (*capital output ratio*) adalah tetap.
- 4) Perekonomian adalah dari dua sektor.

Dalam analisis Harrod-Domar ini merupakan analisis ekonomi jangka panjang. Dalam analisis Harrod-Domar dapat dilihat bahwa:

- 1) Dalam jangka panjang pertambahan pengeluaran agregat yang berkepanjangan perlu dicapai untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi.

⁵ Sadono Sukirno, *Edisi Kedua, Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*, (Jakarta, Kencana, 2006), h. 244-245.

⁶ Ibid, h. 256-257

- 2) Pertumbuhan ekonomi yang teguh hanya mungkin dicapai apabila $I + G + (X-M)$ terus menerus bertambah dengan tingkat yang tinggi.⁷

Penerapan teori Harrod-Domar di Indonesia dapat dilihat melalui program yang diluncurkan pada tahun 2011 yaitu Program Maasterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia (MP3EI) 2011-2025 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan Indonesia. Dimana tabungan dan investasi merupakan hal yang perlu ditingkatkan, tingginya tabungan dan investasi akan memperbesar kemungkinan modal bagi masyarakat sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi. Seperrti yang tertulis dalam program MP3EI, percepatan transformasi ekonomi dititik beratkan pada pendekatan peningkatan *value added*, mendorong investasi, mengintegrasikan sektoral dan regional, serta memfasilitasi percepatan investasi swasta sesuai kebutuhannya.⁸

c. Pokok Pikiran Solow-Swam

Menurut Solow-Swam pertumbuhan ekonomi tergantung pada ketersediaan faktor faktor produksi seperti, pertumbuhan penduduk dan tenaga kerja.

Pandangan teori ini didasarkan pada anggapan yang mendasari analisis ekonomi klasik yaitu bahwa perekonomian berada pada tingkat pengerjaan

⁷ Kurnia Maharani, Sri Isnawati, “Kajian Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja dan Keterbukaan Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah”. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (Jbe)*, Vol. 21, No. 1 (Maret 2014), h. 64

⁸ Gabi Haifa Nadhira, “Teori Pembangunan Yang Sesuai Untuk Indonesia” (On-Line), tersedia di : <http://Mutosagala.Wordpress.Com/2012/03/05/230/> (di Unduh Pada 17 Maret 2018)

penuh *full employment* dan tingkat pemanfaatan penuh *full utilization* dari faktor-faktor produksinya. Dengan kata lain akan terus berkembang dan semua itu bergantung pada penambahan penduduk, tenaga kerja optimal dan akumulasi kapital.

d. Teori David Ricardo

Ricardo berpendapat bahwa faktor pertumbuhan penduduk yang semakin besar sampai menjadi dua kali lipat pada suatu saat akan menyebabkan jumlah tenaga kerja melimpah. Kelebihan tenaga kerja akan mengakibatkan upah menjadi turun. Upah tersebut hanya dapat digunakan untuk membiayai taraf hidup minimum sehingga perekonomian akan mengalami kemandegan (*statonary state*).

e. Teori Islam

1. Dr. Abdullah Abdul Husein At-Tariqy mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi bukan hanya aktivitas produksi material saja. Lebih dari itu, pertumbuhan ekonomi merupakan aktivitas menyeluruh dalam bidang produksi yang terkait erat dengan keadilan distribusi. Pertumbuhan ekonomi bukan hanya diukur dari aspek ekonomi, melainkan aktivitas manusia yang ditujukan untuk pertumbuhan dan kemajuan sisi material dan spritual manusia sekaligus.⁹

⁹ Agustianto, *Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Artikel Ekonomi Islam 2011

2. Mawardi (w.450 H/1058 M) membahas tentang pemerintah dan administrasi, berisi tentang kewajiban pemerintah, penerimaan dan pengeluaran negara, tanah (negara dan masyarakat), hak prerogatif negara untuk menghibahkan tanah, kewajiban negara untuk mengawasi pasar, dan lain-lain. Terdapat tugas muhtasib untuk mengawasi pasar, menjamin ketepatan timbangan dan berbagai ukuran lainnya, serta mencegah penyimpangan transaksi dagang dan pengrajin dari ketentuan syariah.
3. Abu Yusuf (113-182 H/731-798 M) membahas masalah ekonomi. Kitabnya yang berjudul *Al-Kharaj*, banyak membahas ekonomi publik, khususnya tentang perpajakan dan peran negara dalam pembangunan ekonomi. Kitab ini ditulis atas permintaan khalifah Harun Ar-Rasyid untuk pedoman dalam menghimpun pemasukan atau pendapatan negara dari kharaj, ushr, zakat, dan jizyah. Kitab *Al-Kharaj* mencakup berbagai bidang antara lain: tentang pemerintahan, keuangan negara, pertanian, perpajakan, dan peradilan.¹⁰

3. Produk Domestik Regional Bruto

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku atau atas dasar harga konstan. PDRB didefinisikan merupakan jumlah seluruh nilai

¹⁰ Ekonomi Islam/P3EI, Ed-1-Cet.6, (Jakarta, Rajawali Pers, 2004),h.108-109

barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu daerah.

Menurut badan pusat statistik (BPS) ada tiga cara perhitungan PDRB dapat diperoleh melalui tiga pendekatan yaitu:

a. Pendekatan produksi

PDRB menurut pendekatan produksi adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi sembilan sektor lapangan usaha yaitu : 1). Pertanian 2). Pertambangan dan Penggalian 3). Industri Pengolahan 4). Listrik, Gas, dan Air bersih 5). Bangunan dan Konstruksi 6). Perdagangan, Hotel dan Restoran 7). Pengangkutan dan Komunikasi 8). Jasa keuangan, Persewaan dan jasa perusahaan 9). Jasa-jasa lainnya

b. Pendekatan Pendapatan

Menurut pendekatan pendapatan adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor yang ikut serta dalam proses produksi disuatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan.

c. Pendekatan pengeluaran

Menurut pendekatan pengeluaran adalah penjumlahan semua komponen permintaan akhir dari: 1). Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung 2). Konsumsi pemerintah 3).

Pembentukan modal tetap domestik bruto (investasi) dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun) 4). Pembentukan stok 5). Ekspor netto (ekspor dikurang impor).¹¹

4. Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Dalam Pandangan Ekonomi Islam

Dalam melakukan pembangunan yang sangat mendasar salah satu ciri yang menonjol dari kecenderungan yang dominan adalah kepercayaan yang sangat kuat bahwa masyarakat harus ditata di atas landasan Al-Quran dan Sunnah, ini berarti bahwa nilai-nilai, asas-asas, ketentuan-ketentuan, dan peraturan yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah harus dijunjung dengan tinggi dalam rangka mengembangkan bidang-bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan, hukum, dan pemerintahan.¹²

Konsep Islam tentang pembangunan ekonomi lebih luas dari konsep pembangunan ekonomi konvensional walaupun dasar pembangunan ekonomi Islam adalah multidimensional. Pembangunan ekonomi Islam bukan hanya pembangunan materil, tetapi segi spiritual dan moral sangat berperan. Pembangunan moral, dan spiritual harus terintegrasi dengan pembangunan ekonomi.¹³ Sebagaimana firman Allah dalam QS. asy-Syams (91) ayat 7-10:

¹¹ Katalog BPS, *PDRB Tahun 2010*, h.3-5

¹² Lalu Muhammad Iswandi, "*Prinsip Dasar Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Islam* (jurnal lidan Al-Hal, IAI Hamzanwadi Pancor Lotim, NTB, 2013), h.367, mengutip Chapra dkk, *Pembangunan Masyarakat Islam*. h.11-12.

¹³ Nurul Huda dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015),h.21

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴿٧﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٨﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا
وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا ﴿٩﴾

Artinya: Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya). Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.

Demikian pula dalam firman Allah Q.S Al- A'raf ayat 96:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١١﴾

Artinya : Jikalau Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, Maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya

Dari uraian ayat diatas dapat dipahami bahwasanya siapapun yang menyempurnakan jiwanya dan orang yang mensucikan jiwanya maka allah akan menjadikan orang tersebut orang yang beruntung. Dan Allah menjanjikan rizki yang berlimpah kepada suatu kaum bagi suatu negeri yang penduduknya beriman dan bertakwa dan tidak melakukan kemaksiatan. Akan tetapi jika melakukan kemaksiatan maka tidak akan diperoleh ketenangan dan siksa oleh Allah SWT.

Perkembangan sistem ekonomi islam juga banyak dijelaskan oleh tokoh tokoh islam yang berpengaruh diantaranya :

1. Al-Farabi

Al-Farabi seorang filsuf islam menjelaskan didalam karya beliau yang berjudul *Ara`Ahl al-Madinah al-Fadhilah* (Model Kota Idaman). Dalam kitab tersebut, beliau menulis negara ideal bagi Muslim adalah negara yang mampu menyediakan berbagai kebutuhan warganya. Beliau mengatakan bawasannya proses tercapainya kesempurnaan sistim ekonomi melalui beberapa tahap diantaranya:

- a. *Madinah al-Naddzalah* (Masyarakat Kapitalis Negara Egois). Yaitu, negara yang rakyatnya berjuang dan bersaing untuk mencapai kekayaan perseorangan, dan hanya menumpuk harta benda demi kepentingan diri sendiri.
- b. Berikutnya *Madinah al-Jama'iyah*, Bisa dikatakan sebagai Negara Anarchi atau Masyarakat Komunis. merupakan tingkatan setelah kapitalisme. Namun, pada kondisi ini ekonomi menghadapi jalan yang bersimpang dua yaitu anarchi dan komunisme.
- c. *Madinah al-Fadhilah* Negara Utama atau Masyarakat Sosialis. Dalam upaya mencapai kesempurnaan ekonomi, setelah melewati kondisi anarchi barulah ekonomi mencapai puncak yang ditujunya, yaitu tercapainya kebahagiaan yang lengkap, materiil dan spiritual.¹⁴

2. Al-Ghozali

¹⁴ Hafid, *Estimologi Al-Farabi Gagasannya Tentang Daya Daya Manusia* (Jurnal Ilmiah, UIN Jogja Volume 17. Nomor 3. Juli-Desember 2007 h. 35)

Menurut al-Ghazali, dalam membangun suatu perekonomian tidak hanya berhenti pada tujuan materi semata, tetapi disana ada kebutuhan akhirat (hereafter) yang harus dipenuhi oleh pelaku aktivitas ekonomi. Sehingga dalam hal ini, Al-Ghazali membuat klasifikasi pelaku aktivitas ekonomi ke dalam tiga kelompok, antara lain :

- a. Mereka yang hanya memenuhi kebutuhan materi semata, dan melupakan akhirat sebagai tempat mereka kembali, mereka ini tergolong orang yang merugi.
- b. Mereka yang menganggap akhirat itu sebagai rambu segala aktivitas ekonomi mereka, mereka itulah yang untung.
- c. Mereka yang menjadikan akhirat sebagai tujuan akhir setiap aktivitas ekonomi. Mereka itulah yang berada pada jalan yang lurus.

Dengan hal di atas, Al-Ghazali hendak menunjukkan betapa pengaruh tujuan sangat besar dalam mempengaruhi pola aktivitas perekonomian. Aktivitas perekonomian hanyalah sebagai salah jalan untuk menggapai karunia Allah SWT. Oleh karena demikian, internalisasi nilai-nilai ataupun norma dalam aktivitas perekonomian menjadi sebuah keharusan. Al-Ghazali menjadikan al-Qur'an dan Tradisi Rasulullah sebagai landasan aktivitas pola pengembangan ekonomi.¹⁵

3. Chapra

¹⁵ Yusno Abdullah, *Sistim Pemikiran Islam Imam Al-Ghozali* (Jurnal Ekonomi Islam, UIN Jakarta Volume 9. Nomor 2. Mei-agustus. thn 2011. h.5)

menjelaskan bahwa Islam memiliki sistem ekonomi yang secara fundamental berbeda dari sistem-sistem yang tengah berjalan. Ia memiliki akar dan syariat yang membentuk pandangan dunia sekaligus sasaran sasaran dan strategi (maqashid asy-syariah) yang berbeda dari sistem sistem sekuler yang menguasai dunia hari ini. Sasaran-saran yang dikehendaki Islam secara mendasar bukan materiek. Mereka di dasarkan atas konsep-konsep Islam sendiri tentang falah dan hayatan thayyibah (kehidupan yang baik) yang sangat menekankan aspek persaudaraan (ukhuwah), keadilan sosio-ekonomi, dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan spiritual umat manusia.¹⁶

Dalam Islam pertumbuhan ekonomi mempunyai pengertian yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi harus berdasarkan nilai-nilai iman, takwa dan konsisten serta ketekunan untuk melepaskan segala nilai-nilai kemaksiatan dan perbuatan dosa. Hal ini tidak menafikan eksistensi usaha dan pemikiran untuk mengejar segala ketinggalan yang disesuaikan dengan prinsip syariah.

Sama halnya dengan konsep konvensional, dalam pertumbuhan ekonomi perspektif islam, ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi pertumbuhan itu sendiri. Faktor-faktor tersebut adalah.¹⁷

a. Stabilitas Ekonomi, Sosial, dan Politik

Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi diperlukan adanya kondisi yang kondusif. Stabilitas keadaan merupakan faktor utama dalam

¹⁶ Nurul Huda dkk, Op. Cit. h.120

¹⁷ Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam Ditengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta, Zikrul Hakim 2004), h.142

pertumbuhan ekonomi seperti yang dipahami, untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi diperlukan sebuah peraturan dan undang-undang yang disesuaikan dengan latar belakang dan kultur masyarakat. Hal ini telah diatur dalam islam beberapa nilai, norma, dan etika yang dapat membangun stabilitas ekonomi, sosial, dan politik.

b. Tingginya Kegiatan Investasi

Dalam kegiatan ekonomi kegiatan produksi harus tetap berjalan, dengan cara memberdayakan sumber-sumber ekonomi yang terdapat dalam masyarakat, sehingga diperlukan investasi. Investasi yang dilakukan dapat diwujudkan dengan membangun fasilitas-fasilitas kegiatan ekonomi ataupun peralatan dan mesin produksi serta sarana transportasi.

c. Efisiensi Produksi

Teknologi merupakan faktor utama bagi kemajuan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, terlebih dalam penggunaan produksi. Schumpeter menyatakan, inovasi (penemuan teknologi baru) merupakan inti pertumbuhan ekonomi, dan kemajuan teknologi akan mendorong tumbuhnya kegiatan investasi, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

d. Urgensi Pasar

Pasar merupakan elemen penting dalam kegiatan ekonomi, produksi dan distribusi yang kita lakukan tidak akan mempunyai arti tanpa adanya pasar. Ada beberapa kebijakan yang menyebabkan produk-produk negara berkembang tidak kompetitif dengan negara-negara maju. Dengan adanya

market share relatif sempit, akan mematikan kegiatan investasi, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada nilai PDRB.

Satu hal yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah penggunaan parameter *falah*. *Falah* adalah kesejahteraan yang hakiki, kesejahteraan yang sebenar-benarnya dimana komponen-komponen rohaniah masuk ke dalam pengertian *falah* ini. Ekonomi islam dalam arti sebuah sistem ekonomi (nidhom al-iqtishad) merupakan sebuah sistem yang dapat mengantarkan umat manusia kepada *real welfare (falah)*, kesejahteraan yang sebenarnya.

Ekonomi islam harus mampu menyediakan suatu cara untuk mengukur kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial berdasarkan sistem moral dan sosial Islam (Mannan, 1984). Setidaknya ada empat hal yang semestinya bisa diukur dengan pendekatan pendapatan nasional berdasarkan ekonomi Islam, sehingga tingkat kesejahteraan bisa dilihat secara lebih jernih dan tidak biasa. Empat hal tersebut (Nasution dkk, 2006) adalah

1. Pendapatan Nasional Harus Dapat Mengukur Penyebaran Pendapatan Individu Rumah Tangga
2. Pendapatan Nasional Harus Dapat Mengukur Produksi di Sektor Pedesaan
3. Pendapatan Nasional Harus Dapat Mengukur Kesejahteraan Ekonomi Islami

4. Penghitungan Pendapatan Nasional Sebagai Ukuran dari Kesejahteraan Sosial Islami Melalui Pendugaan Nilai Santunan Antar Saudara an Sedekah.¹⁸

Sistem ekonomi Islam menjelaskan bagaimana sebaiknya sistem perekonomian dibangun demi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat yang berorientasi falah atau kesejahteraan bagi umat.¹⁹

Zakat pula memiliki dimensi sosial, moral dan ekonomi, serta merupakan jaminan sosial pertama dari semua peradaban yang ada. Zakat juga berbeda dengan pajak karena dalam perspektif ekonomi islam zakat memiliki dasar, pemahaman dan teori hukum syar'i yang bersumber dari al Qur'an dan hadis yang sangat berbeda dengan pajak. Kesamaan antara zakat dan pajak adalah dalam bentuknya, bukan kesamaan yang hakiki seperti halnya: kewajiban harta untuk pajak (tunai) dan zakat (harta tunai maupun barang berdasarkan prinsip pemerataan), kewajiban pemerintah terhadap pajak (berdasarkan hukum pemerintah) dan zakat (hukum syar'i), kewajiban paksa terhadap pajak (hukum manusia) dan zakat (hukum Allah), kewajiban final dalam pajak (kesejahteraan) dan zakat (pahala/rezeki yang barokah),

¹⁸ Ibid, h.28-32

¹⁹ Ibid, h.118

kewajiban yang ditentukan ukurannya, dalam pajak (kemampuan beban) dan zakat (*nisab*)²⁰

Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat, tujuan dan fasilitas digunakan harus sesuai dengan nilai dan prinsip syariah yang berlandaskan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Walaupun demikian, hal tersebut tidak menafikan konsep dan sistem konvensional sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Investasi adalah persediaan yang di kuasai oleh unit-unit yang mampu mengelola dan menjalankannya produksi, dalam konsep islam cara yang dapat dilakukan dalam berinvestasi dapat berupa penanaman modal, disewakan, di upahkan, atau jika dengan cara pemberian dana maka dapat menggunakan sistem mudharabah, untuk mendapatkan pendapatan dari hasil investasi maka berlaku kaedah fikih “keuntungan adalah imbalan atas kesiapan menanggung kerugian”²¹

Pembentukan modal dalam ragam bentuknya merupakan pilar terpenting yang menopang kesuksesan pengembangan ekonomi. Dalam fikih ekonomi Umar tentang pembentukan modal hakiki, dan pembentukan modal sosial (bangunan dasar) dengan menilai keduanya sebagian bentuk modal yang lazim bagi proses pengembangan ekonomi.

A. Pembentukan Modal Hakiki

²⁰ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2013), h. 98

²¹ <https://Muslim.Or.Id/18586-Investasi-Dan-Cara-Memanfaatkan-Modal.Html>

1. Pembentukan Investasi

Menabung (investasi) merupakan keharusan untuk dapat dikembangkan dalam pembentukan kebutuhan dasar produksi dan melindunginya. Dimana perhatian terhadap pembentukan tabungan dalam fikih ekonomi Umar ini nampak dalam penanggulangan terhadap segala fenomena pemborosan dan melampaui batas kesederhanaan dalam konsumsi.

Sesungguhnya sederhana dalam menggunakan harta agar dapat ditabung dan dipergunakan sebagai modal adalah metode ekonomi yang benar. Sedangkan mengandalkan hutang dari dalam dan luar tidak akan mencukupi, dan tidak akan mencukupi pembentukan tabungan regional.²²

2. Penggunaan Harta

Kekayaan tidak akan memiliki fungsi yang signifikan jika tidak diarahkan pada bidang-bidang investasi yang berguna. Oleh karena itu, Umar menghimbau agar mengembangkan sumber-sumber ekonomi dan melarang penelantarannya.

B. Pembentukan Modal Sosial

1. Pembangunan Kota

Pembangunan kota merupakan sarana dan prasarana mendasar yang menjadi tuntutan dalam proses pengembangan ekonomi, karena di dalamnya dilakukan banyak kegiatan ekonomi, dan di atasnya didirikan berbagai

²² Syabira Muhammad Umar, *Nahwa Nizham Adil* (Jakarta,Pustaka Al-Kautsar,2007), h.

fasilitas dan pelayanan umum. Sebagaimana pembangunan kota juga merupakan faktor terpenting terjadinya stabilitas dimana didalamnya diberikan banyak sarana untuk pengembangan sumber daya manusia.

Sesungguhnya hal ini mendapat perhatian besar dari Umar di antara contoh yang paling menonjol adalah pembangunan kawasan perumahan bagi kaum muslimin di daerah-daerah yang ditaklukkan. Di antara kota terpenting yang dibangun pada masa Umar adalah Basrah, Kufah, Moshul, dan Fusthath. Ketika membangun beberapa kota, Umar memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Memilih tempat yang sesuai
 - b. Perencanaan kota
2. Masjid dan Pasar

Di antara fasilitas umum terpenting yang mendapat perhatian kaum muslimin dalam membangunnya adalah masjid dan pasar, dimana kedua fasilitas tersebut mendapat prioritas daripada yang lainnya.

3. Jalan

Urgensi jalan adalah disebabkan posisinya sebagai sarana yang memudahkan mobilisasi dan peredaran unsur-unsur produksi, dan sebagai sarana yang menghubungkan antar pasar, dan menjadi tempat peredaran hasil produksi.

4. Pelayanan Pos

Pelayan pos pada masa tersebut telah mendapat perhatian dari sisi pengaturannya, penetapan kantornya, dan pengangkatan para pegawai yang khusus melaksanakannya.

5. Fasilitas Umum yang Lain

Diantara fasilitas umum yang dibangun pada masa Umar bin Al-Khatab Ra:

- a. Rumah untuk para tamu (*Dar Adh-Dhiyafah*) dari berbagai daerah yang datang ke Madinah
- b. *Dar Ar-Rizqi* (gudang logistik), yang dibangun di berbagai daerah, yang di dalamnya disimpan bahan-bahan makanan dan dibagikan kepada kaum muslimin.
- c. Pembangunan bendungan untuk mencegah bahaya banjir terhadap kemaslahatan umum.
- d. Diantara pelayanan penting yang dilakukan oleh Umar adalah memberikan penerangan terhadap Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.²³

Adapun kaidah syariah yang berkaitan dengan belanja kebutuhan operasional pemerintah yang rutin mengacu pada kaidah-kaidah yang telah disebutkan di atas, secara lebih perinci pembelanjaan negara harus didasarkan pada hal-hal berikut ini:

- a. Bahwa kebijakan belanja rutin harus sesuai dengan asas maslahat umum, tidak boleh dikaitkan dengan kemaslahatan seseorang atau kelompok.

²³ Al-Haritsi Jaribah bin Ahmad, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab*, (Pustaka Al-Kautsar), h. 506-516

- b. Kaidah atau prinsip efisiensi dalam belanja rutin, yaitu mendapatkan sebanyak mungkin manfaat dalam biaya semurah-murahnya.
- c. Kaidah atau prinsip komitmen dengan aturan syariah, maka alokasi belanja negara hanya boleh pada hal-hal yang mubah dan menjauhi yang haram
- d. Kaidah atau prinsip komitmen dengan skala prioritas syariah dimulai dari yang wajib, sunnah, dan mubah.

Pengeluaran pemerintah dalam perspektif Islam berdasarkan jenisnya dibedakan sebagai berikut:

- a. Wasteful Spending yakni kondisi dimana belanja pemerintah memberikan manfaat yang lebih kecil dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan sehingga pengeluaran yang dikeluarkan relatif tidak memberikan pengaruh tidak signifikan terhadap masyarakat.
- b. Productive Spending yakni apabila belanja pemerintah memberikan manfaat yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Pengeluaran pemerintah memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap perekonomian.
- c. Transfer Payment yakni apabila jumlah manfaat yang diterima dan biaya yang dikeluarkan sama besarnya. Hal ini dilakukan pada jenis pengeluaran seperti subsidi kepada masyarakat, pemberian jaminan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan seperti asuransi kesehatan dan sebagainya.

B. Investasi Swasta

1. Pengertian Investasi

Investasi merupakan suatu pengeluaran sejumlah dana dari investor guna membiayai kegiatan produksi untuk mendapatkan profit dimasa yang akan datang. Investasi tercipta dari penanaman modal baik secara langsung maupun tidak langsung oleh berbagai pihak dengan tujuan memperbesar *output*. Investasi yang lazim disebut dengan istilah penanaman modal berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara bahkan wilayah.

Penanaman modal/investasi sebagai pengeluaran atau perbelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian.²⁴

Bagi suatu negara investasi tridak hanya untuk memaksimalkan *output*, tetapi untuk menentukan distribusi tenaga kerja dan distribusi pendapatan, pertumbuhan dan kualitas penduduk serta teknologi. Tingkat investasi yang tinggi akan meningkatkan kapasitas produksi yang pada akhirnya berujung pada pembukaan lapangan kerja baru. Adanya investasi

²⁴ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000), h. 121

juga memungkinkan terjadinya transfer teknologi dan pengetahuan dari negara maju ke negara berkembang.²⁵

Faktor biaya modal berupa tingkat bunga dan keuntungan yang diharapkan dari investasi, adapula faktor lain yang turut mempengaruhi keputusan seorang investor untuk melakukan investasi antara lain pajak, perkembangan teknologi, penambahan penduduk, akumulasi modal serta perkiraan dan harapan (*expectation*) tentang situasi ekonomi di masa depan.²⁶

2. Tujuan Investasi

Tujuan investasi pada hakekatnya adalah untuk mendapatkan kemaslahatan atau manfaat yang sebesar-besarnya bagi umat manusia. Tujuan tersebut diantaranya yaitu sebagai berikut:²⁷

- a. Membuka lapangan kerja bagi pekerja yang dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia.
- b. Memberikan pendapatan bagi pekerja sehingga dapat mengurangi kefakiran dan kemiskinan penduduk.
- c. Memberikan jaminan ketentraman, ketenangan, kesejahteraan serta kebahagiaan hidup para pekerja dan keluarganya.

²⁵ Basuki Pujoalwanto, *Perekonomian Indonesia, Tinjauan Historis, Teoritis, dan Empiris*, (Yogyakarta, Graha Ilmu 2014), h. 164

²⁶ Andika Ika Fahrika, *Pengaruh Tingkat Suku Bunga Melalui Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*, *Jurnal Ecces Economics, Social, And Development Studies* , Vol. 3 No. 2, Desember 2016, h. 48-49

²⁷ Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam*, (Yogyakarta, Graha Ilmu 2011), h. 74

- d. Berorientasi pada produksi barang dan jasa yang tidak mendatangkan mudharat bagi umat manusia termasuk alam dan segala isinya.
- e. Tidak menggunakan faktor produksi yang melanggar hukum-hukum Allah, baik dalam prosesnya maupun dalam zatnya.

3. Teori Investasi

Menurut Sukirno dalam Sayekti, kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni:

- a. Investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja.
- b. Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi.
- c. Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.²⁸

Menurut N. Gregory Mankiw teori investasi merupakan unsur GDP yang paling sering berubah ketika pengeluaran atas barang dan jasa turun selama resesi. Sebagian besar dari penurunan itu berkaitan dengan turunnya pengeluaran investasi. Ada tiga jenis pengeluaran investasi yaitu: 1). Investasi tetap bisnis (*business fixed investment*) mencakup peralatan dan struktur yang

²⁸ Sayekti Suindiyah D, *Lok. Cit.*

dibeli perusahaan untuk proses produksi. 2). Investasi residensial (*residential investment*) mencakup rumah baru yang orang beli untuk tempat tinggal dan yang dibeli orang tanah untuk disewakan. 3). Investasi persediaan (*inventory investment*) mencakup barang-barang yang disimpan perusahaan digudang, termasuk bahan-bahan dan persediaan, barang dalam proses, dan barang jadi.²⁹

4. Jenis-Jenis Investasi

Berdasarkan sumber daya yang digunakan, investasi dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis sebagai berikut³⁰:

a. Investasi Negara

Investasi ini adalah investasi yang dilakukan oleh negara, atau sumber daya investasi tersebut berasal dari milik atau kekayaan negara. Dalam pelaksanaannya investasi ini dilakukan oleh pemerintah untuk membangun prasarana dan sarana infrastruktur guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Investasi dengan karakteristik seperti ini bersifat nirlaba atau non profit motive, misalnya pembangunan jalan, jembatan, sekolah, pasar, rumah sakit, pelabuhan, bandar udara, terminal, kantor, dan lainnya. dana atau pembiayaan yang dilakukan melalui anggaran pendapatan dan belanja Negara/Daerah (APBN/APBD).

²⁹ *Ibid*, h. 476.

³⁰ Henry Faizal Noor, *Ekonomi Public (ekonomi untuk kesejahteraan rakyat)*, cet. Pertama, (Jakarta, PT. Indeks 2005), h. 49

Investasi ini menghasilkan nilai tambah berupa barang dan jasa, lapangan pekerjaan, sewa, dan bunga, tanpa surplus usaha.

b. Investasi Swasta

Investasi swasta ini adalah investasi yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya para pengusaha, dengan tujuan mendapat manfaat berupa laba. Investasi dengan karakteristik seperti ini dapat dilakukan oleh pribadi atau perusahaan seperti: 1). Usaha Mikro (belum punya badan hukum). 2). Usaha Kecil Menengah (UKM) sebagian sudah berbadan hukum. 3). Usaha Besar yang berbentuk PMA maupun PMDN.

5. Penanaman Modal asing

Pengertian penanaman modal asing menurut Hulman Panjaitan adalah suatu kegiatan penanaman modal yang didalamnya terdapat unsur asing (*foreign element*) yang ditentukan oleh adanya kewarganegaraan yang berbeda, asal modal, dan sebagainya. Dalam penanaman modal asing, modal yang ditanam merupakan modal milik asing maupun modal gabungan antara modal milik asing dengan modal dalam negeri.³¹

Menurut Arsyad manfaat investasi asing atau penanaman modal asing baik Negara sedang berkembang, antara lain : untuk menciptakan lapangan kerja, proses ahli teknologi dan keterampilan yang bermanfaat, sumber tabungan atau devisa. Dengan adanya penanaman modal asing dapat

³¹ Harjono, D. K, Hukum Penanaman Modal (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.

menciptakan lapangan kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran, selain itu dengan adanya investasi asing akan mendapatkan keterampilan baru bagi Negara yang sedang berkembang. Penanaman modal asing juga merupakan sumber tabungan karena dengan adanya investor asing yang menanamkan modalnya maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat.³² Penanaman modal asing harus diarahkan menurut bidang-bidang yang telah ditetapkan prioritasnya oleh pemerintah yaitu untuk sektor-sektor sebagai berikut:

- a. Usaha yang membutuhkan modal swasta sangat besar dan teknologi tinggi.
- b. Usaha yang sifatnya menciptakan lapangan pekerjaan.
- c. Usaha yang menunjang peningkatan penerimaan negara.
- d. Usaha yang menunjang penyebaran pembangunan daerah.

6. Hubungan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Ada dua peran yang dibawa oleh investasi dalam makro ekonomi. Pertama investasi merupakan komponen pengeluaran agregat yang cukup besar dan berubah-ubah. Dengan demikian perubahan besar dalam investasi akan sangat mempengaruhi permintaan agregat dan akhirnya akan berakibat juga pada *output* dan kesempatan kerja. Kedua, investasi menghimpun akumulasi modal. Dengan membangun sejumlah gedung dan peralatan yang berguna, *output* potensial suatu bangsa bertambah, dan pertumbuhan ekonomi

³² Sri Asiyani, *Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing, dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur*, Jurnal Fakultas Ekonomi, UNESA, h.25

jangka panjang akan meningkat. Jelas dengan demikian bahwa investasi memainkan dua peran dalam menentukan jumlah *output* dan pendapatan.³³

Harrod-Domar dalam Arsyad mengembangkan teori Keynes dengan memberi peranan kunci kepada investasi di dalam proses pertumbuhan ekonomi, khususnya mengenai sifat ganda yang dimiliki investasi. Pertama, investasi menciptakan pendapatan (merupakan dampak dari permintaan investasi) dan kedua, investasi memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok kapital (merupakan dampak dari penawaran investasi).³⁴

Dengan semakin besarnya investasi baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta pada barang publik maka diharapkan akan mendorong pertumbuhan sektor swasta dan rumah tangga dalam mengalokasikan sumber daya yang ada di suatu daerah. Hal ini pada akhirnya akan menyebabkan makin meningkatnya PDRB.

C. Pengeluaran Pemerintah

1. Pengertian Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah menurut Sadono adalah pembelanjaan pemerintah ke atas barang-barang modal, barang konsumsi dan ke atas jasa-jasa.³⁵ Menurut Manurung konsumsi pemerintah atau pengeluaran pemerintah

³³ Paul A. Samuelson & William D. Nordhus, *Ekonomi, Edisi Keduabelas*. (Jakarta:Erlangga, 1985), h. 173

³⁴ L, Arsyad. *Op. Cit*, h. 82-85

³⁵ Sadono Sukirno, *Op. Cit*, h.6

adalah pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk membeli barang dan jasa akhir (*government expenditure*).³⁶

Pengeluaran pemerintah diartikan sebagai penggunaan uang dan sumber daya suatu negara untuk membiayai suatu kegiatan negara atau pemerintah dalam rangka mewujudkan fungsinya dalam melakukan kesejahteraan.³⁷ Jadi, dari beberapa pengertian pengeluaran pemerintah dapat diambil kesimpulan bahwa pengeluaran pemerintah merupakan suatu pembiayaan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membeli barang dan jasa maupun yang dibutuhkan suatu daerah.

Pengeluaran pemerintah menjadi bagian penting dari perekonomian makro suatu negara, karena menentukan kemana kondisi ekonomi suatu negara akan dibawa. Pemerintah tidak cukup hanya meraih tujuan akhir dari setiap kebijakan pengeluarannya, tetapi juga harus memperhitungkan sasaran antara yang akan menikmati atau terkena kebijakan tersebut. Memperbesar pengeluaran dengan tujuan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan nasional atau memperluas kesempatan kerja adalah tidak memadai melainkan harus memperhitungkan siapa yang bekerja atau meningkat pendapatannya. Pemerintah pun perlu menghindari agar peningkatan perannya dalam perekonomian justru melemahkan kegiatan pihak swasta.

³⁶ Pratama Rahardja, Mandala Manurung, *Op. Cit*, h.233

³⁷ Basuki Pujoalwanto, *Perekonomian Indonesia, Tinjauan Historis, Teoritis, dan Empiris*. Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, h. 174

Menurut Mangkoesoebroto (2002,hal 2) di negara manapun selalu ada campur tangan atau investasi pemerintah dalam perekonomian. Dalam perekonomian modern, peranan pemerintah dapat diklasifikasikan dalam 3 golongan besar, yaitu:

a. Peranan alokasi

Sumber daya yang dimiliki pada dasarnya dapat digunakan untuk menghasilkan barang swasta (*private goods*) dan barang publik (*public goods*). Barang swasta adalah barang yang ketersediaanya dapat dipenuhi oleh sistem pasar yaitu melalui transaksi antara penjual dan pembeli. Namun tidak semua kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa dapat disediakan oleh sektor swasta. Barang dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh sistem pasar ini dinamakan barang publik (*public goods*) sehingga perlu dialokasikan oleh negara. Contohnya : prasarana jalan, pertahanan, pembersihan udara dan sebagainya, yang pengadaannya perlu peran negara (pemerintah) di dalamnya.

b. Peranan distribusi

Melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat mengubah posisi distribusi pendapatan. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan sistem pajak progresif yaitu beban pajak yang lebih besar dikenakan bagi orang kaya dan relatif lebih ringan bagi orang miskin, yang disertai dengan subsidi kepada kelompok miskin. Melalui subsidi, pemerintah secara tidak langsung bisa mempengaruhi distribusi pendapatan melalui kebijakan anggaran

misalnya dengan memberikan kredit perumahan murah untuk golongan berpendapatan rendah, subsidi pupuk untuk petani.

c. Peranan stabilitas

Selain peran alokasi dan distribusi, pemerintah mempunyai peran utama sebagai stabilator perekonomian. Hal ini dilakukan melalui berbagai regulasi. Pemerintah yang berupaya menjaga terpeliharanya tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat harga yang relatif stabil dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup memadai.³⁸

Pengeluaran pemerintah menurut kelompok dapat dibagi menjadi dua yaitu :³⁹

- 1) Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah dan telah dianggarkan oleh pemerintah daerah.
- 2) Belanja Tidak langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program seperti belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang telah ditetapkan undang-undang, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil

³⁸ Sri Endang Rahayu, *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*, Jurnal Manajemen & Bisnis, Vol 11 No.02 Oktober 2011, h. 128-129

³⁹ Lisa Irma Abigail Lebang, Debby Ch. Rotinsulu, George M.V.Kawung, "Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Bitung, h. 3

kepada provinsi/ kabupaten/ kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak tertuga.

Secara garis besar pemerintah mempunyai tiga fungsi utama, yaitu meningkatkan efisiensi, menciptakan keadilan, dan melaksanakan kebijakan stabilisasi pemerintah yang baik harus senantiasa berusaha menghindari dan memperbaiki kegagalan pasar demi tercapainya efisiensi.⁴⁰

Dalam rangka menekan angka kemiskinan di Indonesia, maka Lampung sebagai salah satu provinsi yang perlu dilakukan kajian tentang pertumbuhan dan kemiskinan, yang dalam hal ini dikaitkan dengan berbagai program pembangunan ekonomi yang dilakukan melalui pengeluaran pemerintah dan investasi swasta. Untuk meningkatkan kemajuan ekonomi baik nasional maupun daerah tidak hanya cukup dengan mengandalkan pengeluaran dari sektor publik, sektor swasta harus semakin diberi porsi yang lebih besar.

2. Teori Pengeluaran Pemerintah

a. Teori Rostow dan Musgrave

Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini

⁴⁰ Ibid, h. 180

pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti : pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi, dan sebagainya.

Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin membesar. Peran swasta yang terlalu besar dapat menyebabkan kegagalan pasar, dan juga dapat menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik.

Pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut, Rostow mengatakan bahwa pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah berubah dari penyediaan sarana dan prasarana ke aktivitas-aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua, pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagainya.

b. Teori Peacock dan Wiseman

Teori ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan memperbesar penerimaan dari pajak, padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat.

Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai tingkat toleransi pungutan pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang

dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah. Sehingga mereka mempunyai tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak.

3. Hubungan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pengeluaran pemerintah adalah bagian dari kebijakan fiskal yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat *output* maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi.⁴¹

Pengeluaran pemerintah berupa pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat. Pemerintah mampu mempengaruhi tingkat pendapatan keseimbangan menurut dua cara yang terpisah. Pertama, pembelian pemerintah atas barang dan jasa (G) yang merupakan komponen dari permintaan agregat. Kedua, pajak dan transfer mempengaruhi hubungan antara output dan pendapatan (Y).

Pengeluaran pemerintah akan memperluas pasaran hasil-hasil perusahaan dari industri yang pada gilirannya akan memperbesar pendapatan.

⁴¹ M.Zahari MS, *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi*, (Jurnal of Economics and Bussiness, Vol. 1 No. 1 September 2017), h.187

Dengan bertambahnya pendapatan yang diperoleh pemerintah, maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka atau penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi perbandingan dan acuan yang memberikan gambaran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu menyangkut pertumbuhan ekonomi. Karena untuk melakukan penelitian perlu ada suatu bentuk hasil penelitian terdahulu yang dijadikan referensi pembanding dalam penelitian, untuk itu pada bagian ini akan diberikan penjelasan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan rencana penelitian ini:

Penelitian tentang pengaruh belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi, apakah berpengaruh secara positif atau negatif belum ada kesimpulan yang sama (sinulingga,2015) namun setidaknya mahzab keynes meyakini bahwa peningkatan belanja pemerintah dapat mendorong peningkatan output (pendapatan) dalam suatu perekonomian, belanja pemerintah dianggap sebagai variabel yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi, namun disisi lain peningkatan belanja pemerintah dapat memicu terjadinya defisit anggaran. (Awe dan Funlayo,2014, Sriyana, 2011, Yurdakul dan Ucar, 2015)

Penelitian yang dilakukan oleh Novia Hadji Ali, Deasy Engka, Steeva Tumangkeng pada tahun 2014 yang berjudul “ Pengaruh Pengeluaran Konsumsi dan Investasi Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota

Manado”. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa pengeluaran konsumsi pemerintah berpengaruh secara positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Manado sedangkan pengeluaran investasi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Manado.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Aminah yang berjudul “ Analisis Pengaruh Investasi Swasta dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Provinsi Jambi”. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa investasi swasta dan pengeluaran pemerintah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi, membandingkan investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi, memperlihatkan bahwa pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan investasi swasta.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Phany Ineke Putri yang berjudul “Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, Belanja Modal, dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pulau Jawa”. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa PMDN, PMA, Tenaga Kerja, Belanja Modal, Infrastruktur yang meliputi jalan aspal, dan listrik mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan, sedangkan variabel jalan tidak aspal berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa periode tahun 2007-2011.

Selanjutnya penelitian lain dilakukan oleh Tri Wahyuningsih yang berjudul “Dampak Investasi Pemerintah dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Maluku”. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa investasi pemerintah dan investasi swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian, pengaruh secara langsung mempunyai kontribusi pengaruh yang lebih besar dibanding dengan pengaruh secara tidak langsung. Sedangkan variabel yang paling besar pengaruh langsungnya terhadap kesejahteraan masyarakat adalah investasi pemerintah, sedangkan yang paling kecil pengaruhnya terhadap kesejahteraan adalah investasi swasta.

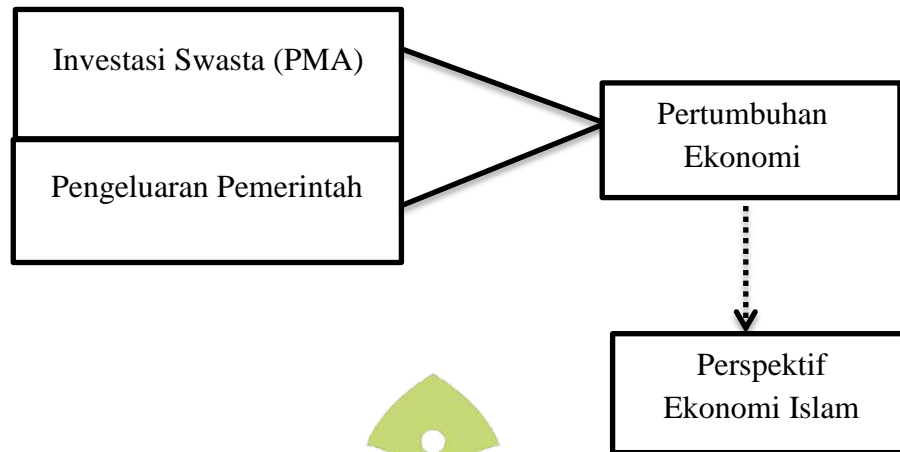
E. Kerangka Pemikiran

Pesatnya penanaman modal baik lokal maupun asing di suatu negara merupakan salah satu indikator bahwa negara tersebut memiliki sistem perekonomian yang baik, karena didukung oleh kecukupan sumber daya, baik sumber daya alam yang tersedia maupun sumber daya manusia. Kondisi ini akan menarik para investor untuk berinvestasi, hal ini tentu akan membawa manfaat yang positif tidak hanya bagi negara tetapi juga setiap daerah yang ada didalam negara tersebut. Pembangunan daerah dengan sistem otonomi daerah ditunjukkan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan kesejahteraan masyarakat. Dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi tersebut dibutuhkan sumber dana maupun sumber daya manusia untuk

mencapai hal itu, Provinsi Lampung menggali dana dari investasi yang ada dan menggali potensi daerahnya untuk menopang pertumbuhan ekonomi.

Investasi pada dasarnya merupakan awal kegiatan untuk membangun suatu daerah, investasi dapat dilakukan oleh swasta, pemerintah, atau kerjasama antar pemerintah dengan swasta. Dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber-sumber daya yang dimiliki Provinsi Lampung dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan daerah. Oleh sebab itu, dengan tingginya tingkat investasi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, dengan investasi asing yang akan meningkatkan nilai pertumbuhan ekonomi (PDRB) serta menambah sumber pendapatan yang tidak hanya pada daerah tetapi juga masyarakat.

Untuk memudahkan penelitian yang dilakukan serta untuk memperjelas alur pemikiran kerangka teori dalam pemikiran ini yang akan dikaji dalam perspektif Ekonomi Islam. Maka disusun suatu kerangka pemikiran yang dapat dilihat pada gambar 1.1 sebagai berikut :

Gambar 2.1**Kerangka Berfikir****F. Hipotesis**

Hipotesis adalah jawaban sementara rumusan masalah penelitian dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk pertanyaan.

1. Pengaruh investasi swasta dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi secara parsial

a. Pengaruh investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi

Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Pembentukan investasi ini telah dipandang sebagai salah satu faktor bahkan faktor utama di dalam pembangunan ekonomi. Terdapat hubungan yang positif antara pembentukan

investasi dengan pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah. Investasi baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) memainkan peranan penting dalam menentukan jumlah *output* dan pendapatan

Ho= Investasi swasta tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung tahun 2011-2016

Ha= Investasi swasta berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung tahun 2011-2016

b. Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi

Pengeluaran pemerintah merupakan seperangkat produk yang dihasilkan yang memuat pilihan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyediakan barang-barang publik dan pelayanan kepada masyarakat. Memperbesar pengeluaran dengan tujuan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan nasional atau dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat dari peningkatan jumlah PDRB.

Ho= Pengeluaran Pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung tahun 2011-2016

Ha= Pengeluaran Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung tahun 2011-2016

2. Pengaruh investasi swasta dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi secara simultan (bersama-sama)

Analisis keynes menunjukkan tentang pentingnya peranan dari permintaan agregat ke atas jumlah barang dan jasa yang akan diproduksi oleh sektor perusahaan di dalam menentukan tingkat kegiatan ekonomi. Terjadi kenaikan investasi perusahaan dan pengeluaran pemerintah akan menyebabkan kenaikan produksi barang dan jasa. Kenaikan barang dan jasa akan menyebabkan peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sehingga berdasarkan penelitian terdahulu dapat dilihat hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut:

Ho= Investasi swasta dan pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung tahun 2011-2016

Ha= Investasi swasta dan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung tahun 2011-2016

\|BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan secara kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.¹

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*Field Research*). yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial baik individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. Penelitian ini menggali data yang bersumber dari instansi yang terkait yaitu Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.

Peneliti juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library reseach*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) yaitu penelitian yang bertujuan mendapatkan data sekunder dengan cara melakukan penelaahan

¹Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R & D*, Alfabeta, Bandung ,h.11.

terhadap beberapa buku yang berkaitan dengan indikator makro ekonomi yaitu investasi swasta, pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung serta data dari jurnal dan artikel.² Yang berkaitan dengan data investasi swasta, pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat *Asosiatif* (Hubungan) , yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya, serta menguji dan menggunakan kebenaran suatu masalah atau pengetahuan.³ Sesuai dengan pengertian tersebut penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan pengaruh antara tingkat investasi swasta dan tingkat pengeluaran pemerintah terhadap yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.

B. Sumber Data

Dalam usaha untuk mencari kebenarannya, penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data-data yang penyajiannya dalam bentuk angka secara sepintas lebih mudah untuk

²Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara,2008),h.5.

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta,2013), h.12

diketahui maupun untuk dibandingkan satu dengan lainnya.⁴ Data-data kuantitatif dalam penelitian ini adalah menganalisis Pengaruh Tingkat Investasi Swasta dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam tahun 2011-2016. Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder yaitu data data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data sekunder dengan mengutip literatur dari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian data-data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, selain itu data dalam penelitian ini diperoleh melalui sumber-sumber diluar instansi yang dipublikasikan seperti Perpustakaan Fakultas Ekonomi, Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, jurnal, artikel, Al-Qur'an dan Al-Hadis dan internet.

Data yang digunakan berupa data *time series* dari tahun 2011-2016 yaitu yang terdiri dari data PDRB Provinsi Lampung berdasarkan harga konstan.

⁴ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktif*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, h.97

C. Metode Pengumpulan Data

1. Dokumentasi

Dalam teknik pengumpulan data, Untuk mengumpulkan data dan informasi penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Metode Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan jalan melihat, membaca, mempelajari, kemudian mencatat data yang sudah ada hubungannya dengan objek penelitian. Metode ini dilakukan dengan mengambil dokumentasi atau data yang mendukung penelitian, seperti tingkat investasi swasta, tingkat pengeluaran pemerintah dan tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung tahun 2011-2016 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari dan mengambil data dari literature terkait dan sumber-sumber lain seperti buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai penelitian ini.⁵

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh

⁵ Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2015, h. 157

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁶ Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan berdasarkan jangka waktu yaitu Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Lampung menurut pengeluaran..

Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah *Purposive Sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu.⁷ Dengan kata lain peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu. Dalam penentuan sampel maka ditetapkan oleh peneliti beberapa kriteria yang digunakan sebagai sampel yaitu seluruh data investasi swasta, pengeluaran pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi dalam bentuk laporan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Lampung menurut pengeluaran yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung dan yang menjadi sampel yaitu 6 tahun terakhir dari tahun 2011-2016.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian.⁸ Dalam penelitian ini penulis menggunakan sampel enam tahun yaitu data investasi swasta, data

⁶ Sugiyono, *Op. Cit*, h. 174.

⁷ Sugiono, *Op.Cit*, h. 61

⁸ Wiratna Sujarweni, *Op. Cit*, h. 81

pengeluaran pemerintah, dan data pertumbuhan ekonomi provinsi Lampung dari tahun 2011-2016

E. Definisi Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua variabel. Variabel yang pertama merupakan variabel independen yaitu tingkat investasi swasta dan pengeluaran pemerintah. Variabel kedua adalah variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi.

1. Variabel Dependen (Y)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini terdapat satu variabel terikat yang digunakan yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi. Data tingkat pertumbuhan ekonomi yang akan diteliti adalah data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung tahun 2011-2016.

2. Variabel Independen (X)

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat baik secara positif maupun secara negatif. Jika terdapat variabel dependen maka harus terdapat variabel independen. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel independen yaitu investasi swasta dan pengeluaran pemerintah yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.

Berdasarkan uraian di atas, adapun definisi operasional variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini diringkas dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Daftar Operasional Variabel

| Variabel | Indikator | Ukuran | Sumber | Skala Pengukuran variabel |
|-----------------------------|---|---|---------------|----------------------------------|
| Investasi Swasta (X1) | Jumlah Nilai Investasi Swasta | Jumlah Nilai Investasi Swasta dari PMA 2011-2016 | BPS | Rupiah (Rp) |
| Pengeluaran Pemerintah (X2) | Total Pengeluaran Pemerintah | Total Pengeluaran Pemerintah dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung 2011-2016 | BPS | Rupiah (Rp) |
| Pertumbuhan Ekonomi (Y) | Total PDRB atas Harga Konstan Menurut Pengeluaran | Total PDRB atas Harga Konstan Menurut Pengeluaran 2011-2016 | BPS | Rupiah (Rp) |

F. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda yaitu tentang analisis bentuk dan tingkat hubungan antar variabel dependen, dengan lebih dari satu variabel independen. Sementara analisis regresi berganda pada penelitian ini melibatkan dua variabel (X) yaitu investasi swasta dan pengeluaran pemerintah dan satu

variabel (Y) yaitu pertumbuhan ekonomi. Maka digunakan uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y), maka peneliti menggunakan analisis regresi untuk membandingkan dua variabel yang berbeda. Pada analisis regresi untuk memperoleh model regresi yang bisa dipertanggung jawabkan, maka asumsi-asumsi berikut harus dipenuhi. Ada empat pengujian dalam uji asumsi klasik, yaitu:

a. Uji Normalitas

Regresi yang baik adalah regresi yang memiliki data yang berdistribusi normal. Uji normalitas perlu dilakukan untuk melihat data dari setiap variabel yang akan dianalisis berdistribusi secara normal. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji *Kolmogrov-Smirnov*.⁹ Uji *Kolmogrov-Smirnov* adalah uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku. Dengan pengambilan keputusan:

- a). Jika Signifikansi $> 0,05$ maka data berdistribusi normal
- b). Jika Signifikansi $< 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal

b. Uji Multikolinieritas

⁹ Nor Juliansyah, *Analisis Data Penelitian Ekonomi dan Manajemen* (Jakarta: PT. Grasindo, 2014), h. 47

Uji multikolinieritas dimaksudkan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Apabila terjadi korelasi antara variabel bebas maka terdapat problem multikolinieritas (multiko) pada model regresi tersebut. Deteksi adanya multikolinieritas:

1. Besarnya VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *Tolerance*

Model regresi yang bebas multikolinieritas adalah:

- a). Mempengaruhi nilai VIF disekitar angka 1
- b). Mempunyai angka tolerance mendekati 1

2. Besaran Korelasi antara variabel independen

Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinieritas adalah koefisien korelasi antar variabel dibawah 0,05. Jika korelasi kuat maka terjadi problem multikolinieritas.¹⁰

C. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.¹¹

207 ¹⁰ V. Wiratna Sujarweni, *SPSS Untuk Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2015), h.

¹¹ Ibid, h. 58

D. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara variabel pengganggu pada periode t dengan pengganggu periode sebelumnya ($t-1$). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dalam suatu penelitian, dapat dideteksi dengan menggunakan uji *runs test*.

Uji *runs test* dapat dilihat dengan hasil jika nilai Asymp, Sig. (2-tailed) lebih kecil < dari 0,05 maka terdapat gejala autokorelasi. Dan jika nilai Asymp, Sig. (2-tailed) lebih besar dari > 0,05 maka tidak terdapat gejala autokorelasi.

2. Uji Hipotesis

a. Uji T atau Uji Parsial

Uji T ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, yaitu pengaruh masing-masing variabel independen yang terdiri atas pengaruh Investasi Swasta dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi yang merupakan variabel dependennya. Seperti halnya dengan uji hipotesis secara simultan, pengambilan keputusan uji hipotesis secara parsial juga didasarkan pada nilai probabilitas yang didapatkan dari hasil pengolahan data.

1). Jika probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima

2). Jika probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak

b. Uji F atau Uji Simultan

Uji F ini digunakan untuk menguji apakah variabel independen ($X_1, X_2, X_3, \text{dst}$) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y) dari suatu persamaan regresi dengan menggunakan hipotesis statistik. Pengambilan keputusan didasarkan pada nilai probabilitas yang didapatkan dari hasil pengolahan data melalui program SPSS Statistik Parametrik sebagai berikut:

1). Jika probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak

2). Jika probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) berfungsi untuk melihat sejauh mana keseluruhan variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Apabila angka determinasi semakin kuat, yang berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen. Sedangkan apabila nilai koefisien determinasi (*R square*) yang lebih kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen adalah terbatas.

4. Uji Regresi Linier Berganda

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Regresi linier berganda berguna untuk meramalkan pengaruh dua variabel atau lebih terhadap satu variabel atau untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsional antara dua buah variabel bebas (X) atau lebih dengan sebuah variabel terikat (Y).¹²

Dimana model ekonomi:

$$Y = a + b_1.X_1 + b_2.X_2 + b_3.X_3 + \dots + b_k.X_k + e$$

Keterangan:

Y : Pertumbuhan Ekonomi

a : Bilangan Konstanta

X₁ : Investasi Swasta

X₂ : Pengeluaran Pemerintah

b : Koefisien Regresi

e : error

¹² Usman, Husaini, dan Setiadi, Pengantar Statistika, (PT Bumi Aksara, Jakarta, 2003), h. 241

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Provinsi Lampung

Provinsi Lampung lahir pada tanggal 18 Maret 1964 dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 3/1964 yang kemudian menjadi Undang-undang Nomor 14 tahun 1964. Sebelum itu Provinsi Lampung merupakan Keresidenan yang tergabung dengan Provinsi Sumatera Selatan.

Kendatipun Provinsi Lampung sebelum tanggal 18 maret 1964 tersebut secara administratif masih merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan, namun daerah ini jauh sebelum Indonesia merdeka memang telah menunjukkan potensi yang sangat besar serta corak warna kebudayaan tersendiri yang dapat menambah khasanah adat budaya di Nusantara yang tercinta ini. Oleh karena itu pada zaman VOC daerah Lampung tidak terlepas dari incaran penjajahan Belanda.

Dari perundingan-perundingan antara VOC dengan Sultan Haji menghasilkan sebuah piagam dari Sultan Haji tertanggal 27 Agustus 1682 yang isinya antara lain menyebutkan bahwa sejak saat itu pengawasan perdagangan rempah-rempah atas daerah Lampung diserahkan oleh Sultan Banten kepada VOC yang sekaligus memperoleh monopoli perdagangan di daerah Lampung.

Penempatan wakil-wakil Sultan Banten di Lampung yang disebut “Jenang” atau kadang-kadang disebut Gubernur hanyalah dalam mengurus kepentingan perdagangan hasil bumi (lada). Sedangkan penguasa-penguasa Lampung asli terpencar-pencar pada tiap-tiap desa atau kota yang disebut “Adipati” secara hirarkis tidak berada dibawah koordinasi penguasaan Jenang/Gubernur. Jadi penguasaan Sultan Banten atas Lampung adalah dalam hal garis pantai saja dalam rangka menguasai monopoli arus keluarnya hasil-hasil bumi terutama lada, dengan demikian jelas hubungan Banten-Lampung adalah dalam hubungan saling membutuhkan satu dengan lainnya.

Sejak tahun 1817 posisi Raden Intan semakin kuat, dan oleh karena itu Belanda merasa khawatir dan mengirimkan ekspedisi kecil dipimpin oleh Assisten Residen Krusemen yang menghasilkan persetujuan bahwa:

1. Raden Intan memperoleh bantuan keuangan dari Belanda sebesar f. 1.200 setahun.
2. Kedua saudara Raden Intan masing-masing akan memperoleh bantuan pula sebesar f.600 tiap tahun
3. Raden Intan tidak diperkenankan meluaskan lagi wilayah selain dari desa-desa yang sampai saat itu berada dibawah pengaruhnya.

Tetapi persetujuan itu tidak pernah dipatuhi oleh Raden Intan dan ia tetap melakukan perlawanan-perlawanan terhadap Belanda. Pada saat itu rakyat dipedalaman tetap melakukan perlawanan, “Jalan Halus” dari Belanda dengan memberikan hadiah-hadiah kepada pemimpin-pemimpin perlawanan

rakyat Lampung ternyata tidak membawa hasil. Belanda tetap merasa tidak aman, sehingga Belanda membentuk tentara sewaan yang terdiri dari orang-orang Lampung sendiri untuk melindungi kepentingan-kepentingan Belanda di daerah TelukBetung dan sekitarnya. Perlawanan rakyat yang digerakkan oleh putra Raden Imba Kusuma sendiri yang bernama Raden Intan II tetap berlangsung terus, sampai akhirnya Raden Intan II ini ditangkap dan dibunuh oleh tentara –tentara Belanda yang khusus didatangkan dari Batavia.

Sejak itu Belanda mulai leluasa menancapkan kakinya di daerah Lampung. Perkebunan mulai dikembangkan yaitu penanaman kaitsyuk, tembakau, kopi, karet dan kelapa sawit. Untuk kepentingan-kepentingan pengangkutan hasil-hasil perkebunan itu maka tahun 1913 dibangun jalan kereta api dari Telukbetung menuju Palembang. Hingga menjelang Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945 dan periode perjuangan fisik setelah itu, putra Lampung tidak ketinggalan ikut terlibat dan merasakan betapa pahitnya perjuangan melawan penindasan penjajah yang silih berganti. Sehingga pada akhirnya sebagai mana dikemukakan pada awal uraian ini pada tahun 1964. Keresidenan Lampung ditingkatkan menjadi Daerah Tingkat 1 Provinsi Lampung.

2. Geografi Provinsi Lampung

Daerah Provinsi Lampung meliputi areal dataran seluas 35.288,35 km² termasuk pulau-pulau yang terletak pada bagian sebelah paling ujung tenggara pulau Sumatera, dan dibatasi oleh:

- a. Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu, di Sebelah Utara
- b. Selat Sunda, di Sebelah Selatan
- c. Laut Jawa, di Sebelah Timur
- d. Samudra Indonesia, di Sebelah Barat

Secara geografis Provinsi Lampung terletak pada kedudukan: Timur - Barat berada antara : $103^{\circ}40'$ - $105^{\circ}50'$ Bujur Timur Utara - Selatan berada antara : $6^{\circ}45'$ - $3^{\circ}45'$ Lintang Selatan. Provinsi Lampung dengan ibukota Bandar Lampung, yang merupakan gabungan dari kota kembar Tanjung Karang dan Teluk Betung memiliki wilayah yang relatif luas, dan menyimpan potensi kelautan. Pelabuhan utamanya bernama Panjang dan Bakauheni serta pelabuhan nelayan seperti Pasar Ikan (Teluk Betung), Tarahan, dan Kalianda di Teluk Lampung. Sedangkan di Teluk Semangka adalah Kota Agung, dan di Laut Jawa terdapat pula pelabuhan nelayan seperti, Labuhan Maringgai dan Ketapang. Disamping itu, kota Menggala juga dapat dikunjungi kapal-kapal nelayan dengan menyusuri sungai Way Tulang Bawang, adapun di Samudera Indonesia terdapat pelabuhan Krui. Lapangan terbang utamanya adalah “Raden Intan II”, yaitu nama baru dari “Branti”, 28 km dari ibukota melalui jalan negara menuju Kotabumi, dan Lapangan terbang AURI terdapat di Menggala yang bernama Astra Ksetra.

Secara topografi Daerah Lampung dapat dibagi dalam lima unit topografi yaitu : daerah topografis berbukit sampai bergunung, daerah topografis berombak sampai bergelombang, daerah dataran alluvial, daerah

dataran rawa pasang surut, daerah river basin. Punggung sebelah barat Lampung adalah bagian dari bukit barisan yang merupakan geantiklinal dengan sinklinal yang terdapat di sebelah timurnya.

3. Administrasi Pemerintah

Provinsi Lampung sebelum tanggal 18 Maret 1964 adalah merupakan Keresidenan Lampung, yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1964, yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 14 tahun 1964. Keresidenan Lampung ditingkatkan menjadi Provinsi Lampung dengan Ibukota Tanjung Karang – Teluk Betung. Selanjutnya Kotamadya TanjungKarang-TelukBetung tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 tahun 1983 telah diganti namanya menjadi Kotamadya Bandar Lampung terhitung sejak tanggal 17 Juni 1983.

Secara administratif Provinsi Lampung dibagi dalam 15 kabupaten/kota sebagai berikut :

Tabel 4.1
Nama-Nama Kabupaten dan Ibukotanya di Provinsi Lampung

| No | Nama Kabupaten | Nama Ibukota |
|----|-------------------------------|-----------------|
| 1 | Kabupaten Lampung Barat | Liwa |
| 2 | Kabupaten Tanggamus | Kota Agung |
| 3 | Kabupaten Lampung Selatan | Kalianda |
| 4 | Kabupaten Lampung Timur | Sukadana |
| 5 | Kabupaten Lampung Tengah | Gunung Sugih |
| 6 | Kabupaten Lampung Utara | Kotabumi |
| 7 | Kabupaten Way Kanan | Blambangan Umpu |
| 8 | Kabupaten Tulang Bawang | Menggala |
| 9 | Kabupaten Pesawaran | Gedong Tataan |
| 10 | Kabupaten Pringsewu | Pringsewu |
| 11 | Kabupaten Mesuji | Mesuji |
| 12 | Kabupaten Tulang Bawang Barat | Panaragan Jaya |
| 13 | Kabupaten Pesisir Barat | Krui |
| 14 | Kota Bandar Lampung | Bandar Lampung |
| 15 | Kota Metro | Metro |

Sumber: Provinsi Lampung dalam angka tahun 2016

Sejak berdirinya Provinsi Lampung tahun 1964 sampai saat ini telah dijabat oleh 9 (sembilan) Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I berturut-turut sebagai berikut:

Tabel 4.2
Daftar Gubernur Provinsi Lampung Beserta Periode Jabatan

| No | Nama Gubernur | Periode Jabatan |
|----|------------------------------|-----------------|
| 1 | Koesno Danu Upoyo | 1964 – 1966 |
| 2 | Hi. Zainal Abidin PA | 1966 – 1972 |
| 3 | R. Soetiyoso | 1972 – 1978 |
| 4 | Yasir Hadibroto | 1978 – 1988 |
| 5 | Poedjono Pranyoto | 1988 – 1998 |
| 6 | Drs. Oemarsono | 1998 – 2002 |
| 7 | Hari Sabarno | 2002 – 2004 |
| 8 | Drs. Hi. Sjachroeddin ZP, SH | 2004 – 2008 |
| 9 | Drs. Syamsurya Ryacudu | 2008 – 2009 |
| 10 | Drs. Hi. Sjachroeddin ZP, SH | 2009 – 2014 |
| 11 | M. Ridho Ficardo, Spi, Msi | 2014 – sekarang |

Sumber: Provinsi Lampung dalam angka tahun 2016

B. Gambaran Hasil Penelitian

Penelitian ini menganalisis pengaruh Investasi Swasta, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data *Time Series* atau rentang waktu mulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016. Alat pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah perangkat lunak (*software*) komputer SPSS dengan metode analisis regresi linier berganda. Oleh karena itu, perlu dilihat bagaimana gambaran perkembangan secara umum dari pertumbuhan ekonomi (PDRB), investasi swasta (PMA), dan pengeluaran pemerintah provinsi Lampung dari tahun ke tahun.

1. Investasi Swasta (PMA) Provinsi Lampung

Investasi merupakan pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan.

Berdasarkan sumber dan kepemilikan modal, maka investasi swasta dibagi menjadi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Berikut data investasi penanaman modal asing tahun 2011-2016 sebagai berikut:

Tabel 4.3
Jumlah Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan
Penanaman Modal Asing (PMA) tahun 2011-2016

| Tahun | PMDN (dalam milyar rupiah) | PMA (dalam milyar rupiah) |
|-------|-------------------------------|------------------------------|
| 2011 | 6.911.242,66 | 731.801.928 |
| 2012 | 302.477,80 | 1.063.000.000 |
| 2013 | 1.442.000.000 | 469.000.000 |
| 2014 | 3.463.000.000 | 1.643.000.000 |
| 2015 | 1.102.000,29 | 3.222.000.000 |
| 2016 | 6.032.000.000 | 1.173.000.000 |

Sumber: BPS Provinsi Lampung

Berdasarkan tabel 4.3 diatas menyatakan bahwa investasi swasta PMA mengalami fluktuasi. Dari tahun 2011 sebesar 731.801.928 mengalami kenaikan di tahun 2012 sebesar 331.198.072 dan di tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 594.000.000 kemudian di tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 1.174.000.000 dan tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 1.579.000.000 dan tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 2.049.000.000

Dengan semakin besarnya investasi pemerintah pada barang publik maka diharapkan akan mendorong pertumbuhan sektor swasta dan rumah tangga dalam mengalokasikan sumberdaya yang ada disuatu daerah. Hal ini pada akhirnya akan menyebabkan makin meningkatnya PDRB

2. Pengeluaran Pemerintah Provinsi Lampung

Pengeluaran pemerintah yang merupakan cerminan dari kebijakan fiskal adalah salah satu instrumen pemerintah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Untuk wilayah yang sedang berkembang besarnya nilai

pengeluaran pemerintah sangat berpengaruh terhadap kemajuan perekonomiannya.

Pengeluaran pemerintah akan lebih efektif jika diarahkan pada kegiatan yang dapat mendorong investasi swasta. Jika pengeluaran tersebut diprioritaskan untuk kegiatan yang konsumtif, maka sasaran pengembangan ekonomi akan terhambat. Pemerintah mempunyai peranan penting dalam perekonomian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun perkembangan pengeluaran pemerintah provinsi Lampung tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Realisasi Pengeluaran (belanja) Pemerintah Provinsi Lampung
Tahun 2011-2016

| Tahun | Pengeluaran Pemerintah |
|--------------|-------------------------------|
| 2011 | 2.566.078.806 |
| 2012 | 3.835.996.351,82 |
| 2013 | 3.884.534.953,49 |
| 2014 | 4.454.187.317,37 |
| 2015 | 4.781.202.048,88 |
| 2016 | 5.476.921.595,65 |

Sumber: *Statistik Keuangan Daerah Provinsi Lampung tahun 2011-2016*
(data diolah)

3. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu ukuran yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi tidak akan terlepas dari peranan para pelaku ekonomi yaitu pemerintah yang berperan

dengan kebijakan publik, fiskal, swasta yang berperan dalam pengembangan investasi, dan pengeluaran pemerintah.

Dalam pembahasan ini akan diperhatikan berapa besar pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung dari tahun 2011-2016 dimana data yang digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi adalah data PDRB atas dasar harga konstan. Perkembangan PDRB untuk provinsi Lampung selama 6 tahun dari tahun 2011 samapai dengan tahun 2016 terus mengalami perubahan dari tahun ke tahunnya. Berikut data perkembangan PDRB provinsi Lampung dari tahun 2011 sampai tahun 2016:

Tabel 4.5
PDRB Provinsi Lampung tahun 2011-2016

| Tahun | PDRB |
|-------|-----------|
| 2011 | 160437501 |
| 2012 | 170769207 |
| 2013 | 180620008 |
| 2014 | 189797491 |
| 2015 | 199536099 |
| 2016 | 209807186 |

Sumber: PDRB Provinsi Lampung tahun 2011-2016 (diolah)

C. Analisis Data

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Pada penelitian ini di lakukan uji normalitas data untuk melihat apakah data dari variabel-variabel yang digunakan berdistribusi normal. Berikut adalah tabel uji normalitas menggunakan uji SPSS 16.0.:

Tabel 4.6
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

| | Unstandardized Residual |
|---------------------------------------|-------------------------|
| N | 6 |
| Normal Parameters ² : Mean | .0000000 |
| Std. Deviation | 4.29510142E6 |
| Most Extreme Differences : Absolute | .270 |
| Positive | .193 |
| Negative | -.270 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | .661 |
| Asymp. Sig. (2 - tailed) | .776 |

Sumber: data sekunder yang diolah, 2018

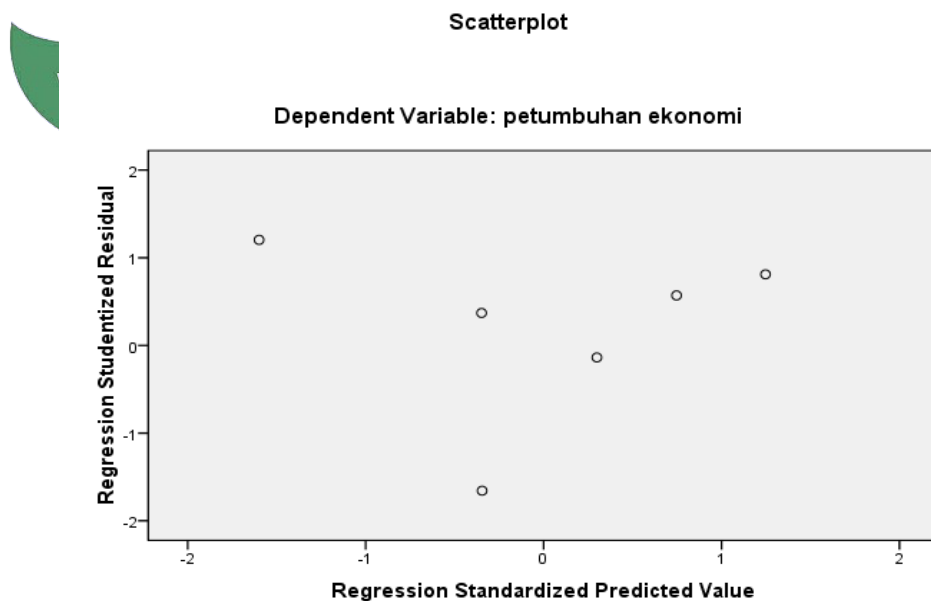
Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan model Kolmogorov Smirnov Z menunjukkan angka sebesar 0,661 dan nilai signifikansi yang ditunjukkan sebesar 0,776. Untuk melihat data yang digunakan berdistribusi normal atau tidak, maka dapat diketahui dengan melihat nilai signifikansi data dari uji normalitas diatas menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,776 nilai tersebut lebih besar dari $\alpha = 0,05$ artinya bahwa nilai dari data tersebut berdistribusi normal.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dan *residual* satu pengamatan yang lain. Jika *variance* dan *residual* satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas atau tidak terjadi homoskedastisitas. Cara memprediksi ada

atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dengan pola gambar *scatterplot*, regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas jika titik-titik data menyebar diatas dan dibawah atau sekitar angka 0, titik-titik data yang mengumpul hanya pada diatas atau dibawah saja, penyebaran data tidak boleh membentuk pola pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali, penyebaran titik-titik data titik berpola. Hasil uji heteroskedastisitas dalam gambar 4.1 sebagai berikut:

Gambar 4.1
Uji Heteroskedastisitas



Hasil pengolahan data heteroskedastisitas diperoleh dari titik-titik data menyebar diatas dan dibawah atau sekitar angka 0, titik-titik data

tidak mengumpul hanya diatas dan dibawah saja, penyebaran titik-titik data tidak berpola, maka dapat ditarik kesimpulan tidak terjadi heteroskedastisitas

c. Uji Multikolinearitas

Uji ini dilakukan untuk melihat apakah terdapat korelasi antar variabel independen. Nilai *Cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan gejala multikolinearitas dengan melihat nilai *Tolerance* $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai *VIF* ≥ 10 . Hasil uji multikolineritas pada penelitian ini ditunjukkan dengan tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.7**
Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. | Collinearity Statistics | |
|------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|-------------------------|-------|
| | B | Std. Error | Beta | | | Tolerance | VIF |
| 1 (Constant) | 1.116 | 1.078 | | 10.346 | .002 | | |
| investasi swasta | .001 | .003 | .080 | .520 | .639 | .772 | 1.295 |
| pengeluaran pemerintah | .017 | .003 | .931 | 6.039 | .009 | .772 | 1.295 |

Sumber: Data diolah 2018

Hasil uji multikolinearitas pada tabel 4. Menunjukkan bahwa data yang tidak terjadi gejala multikolinearitas antara masing-masing variabel independen dalam model regresi yaitu melihat nilai *VIF* dan nilai *tolerance*.

Hasil perhitungan *tolerance* menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki *tolerance* kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen. Hasil *Variance Inflation Factors* (VIF) juga menunjukkan hal yang sama tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya ($t-1$). Penelitian ini menggunakan model regresi dengan uji *Runs Test*. Hasil uji *Runs Test* ditunjukkan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 4.8
Uji Autokorelasi
Runs Test

| | Unstandardized Residual |
|-------------------------|-------------------------|
| Test Value ^a | 1.37335E6 |
| Cases < Test Value | 3 |
| Cases >= Test Value | 3 |
| Total Cases | 6 |
| Number of Runs | 5 |
| Z | .456 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | .648 |

sumber: data diolah
2018

Hasil uji autokorelasi dengan model *runs test* menunjukkan nilai Asymp, Sig. (2-tailed) sebesar $0.648 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terdapat gejala autokorelasi.

D. Hasil Penelitian

1. Uji Parsial (uji T)

Uji statistik t pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual dapat mempengaruhi variasi variabel dependen. Dalam penelitian ini uji hipotesis digunakan untuk mengetahui adanya masing-masing pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang dalam penelitian ini adalah pengaruh Investasi Swasta dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Ketentuan yang digunakan dalam uji statistik t adalah jika nilai signifikansi sebesar $\alpha = 0,05$ (5%), maka H_0 dapat ditolak dengan demikian H_a dapat diterima. Dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Berikut hasil uji t pada variabel-variabel independen terhadap variabel dependen :

Tabel 4.9
Hasil Pengujian Uji T
Coefficients^a

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. |
|------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| (Constant) | 1.116 | 1.078 | | 10.346 | .002 |
| investasi swasta | .001 | .003 | .080 | .520 | .639 |
| pengeluaran pemerintah | .017 | .003 | .931 | 6.039 | .009 |

Sumber: Data diolah 2018

Berdasarkan pengujian regresi secara parsial pada tabel 4. diatas menunjukkan bahwa variabel investasi swasta tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. Hal ini dikarenakan nilai t hitung sebesar 0,520 dan nilai t tabel 1,943, $t_{hitung} < t_{tabel}$ (0,520 < 1,943) atau nilai signifikansi lebih besar dari α 0,05% (0,639 > 0,05).

Variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. Hal ini dikarenakan nilai t hitung sebesar 6,039 dan nilai t tabel 1,943, $t_{hitung} > t_{tabel}$ (6,039 > 1,943) atau nilai signifikansi lebih kecil dari α 0,05% (0,009 < 0,05).

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji statistik F pada dasarnya bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Berdasarkan uji Anova atau uji F yang dilakukan pada variabel Investasi Swasta, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi.

Tabel 4.10
Uji Simultan (uji F)

| Model | Sum of Squares | Df | Mean Square | F | Sig |
|------------|----------------|----|-------------|--------|-----|
| Regression | 1.582 | 2 | 7.912 | 25.732 | .01 |
| Residual | 9.224 | 3 | 3.075 | | |
| Total | 1.675 | 5 | | | |

Sumber: data sekunder 2018

Berdasarkan tabel 4.10 diketahui hasil uji signifikansi simultan (uji F) diatas menunjukkan nilai sig. $0,01 < 0,05$. Nilai signifikansi $0,01 < 0,05$ itu artinya nilai signifikansi uji F jauh lebih kecil dari $\alpha = 5\%$, sehingga dapat ditunjukkan bahwa variabel investasi swasta dan pengeluaran pemerintah berpengaruh secara signifikansi terhadap pertumbuhan ekonomi karena nilai sig $0,01 < 0,05$.

3. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada dasarnya adalah untuk mengukur seberapa jauh kemampuan suatu model dalam menerangkan variasi dari variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi-variabel variabel dependen terbatas. Nilai yang mendekati angka satu berarti variabel-variabel dependen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Model koefisien determinasi memiliki kelemahan yaitu terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Dalam penelitian ini menggunakan nilai dari Adjusted R^2 untuk mengevaluasi mana model regresi terbaik.

Tabel 4.11
Hasil Pengujian Adjusted R square

| Mode | R | R Square | Adjusted R Square |
|------|------|----------|-------------------|
| 1 | .972 | .945 | .908 |

Sumber : data sekunder diolah 2018

Dari tabel 4.11 dapat dianalisis pengaruh investasi swasta dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien determinasi Adjusted R square sama dengan 0,908 yang artinya adalah besarnya pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel bebas dalam hal ini sebesar 90,8% dan sisanya sebesar 9,2 dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimaksud dalam penelitian ini.

4. Analisis Regresi Linier Berganda

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Dalam penelitian ini analisis regresi linier berganda bertujuan untuk melihat pengaruh antara investasi swasta dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Adapun hasil yang ditunjukkan dari uji regresi berganda dalam tabel berikut:

Tabel 4.12
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients |
|------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|
| | B | Std. Error | Beta |
| 1 (Constant) | 1.116 | 1.078 | |
| investasi swasta | .001 | .003 | .080 |
| pengeluaran pemerintah | .017 | .003 | .931 |

Sumber: Data diolah 2018

$$Y = 1.116 + 0.001 X_1 - 0.017 X_2 + e$$

Dimana: a = Konstanta

X₁ = Investasi Swasta

X₂ = Pengeluaran Pemerintah

Persamaan regresi diatas menunjukkan nilai konstanta sebesar 1.116 menyatakan bahwa jika variabel investasi swasta dan pengeluaran pemerintah dianggap konstan, maka rata-rata alokasi pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 1.116. Sementara itu dari hasil regresi tersebut menunjukkan:

- a. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa investasi swasta tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dikarenakan nilai signifikan investasi swasta sebesar 0.639 lebih besar dibandingkan dengan nilai signifikansi $\alpha = 0,05$. Sementara pengeluaran pemerintah memiliki nilai signifikan

sebesar 0.009, lebih kecil dibandingkan nilai signifikansi artinya berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

- b. Koefisien regresi variabel investasi swasta sebesar 0.001 menunjukkan bahwa jika variabel investasi swasta meningkat satu satuan maka variabel pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan sebesar 0.001 satuan dengan ketentuan variabel lainnya konstan.
- c. Koefisien regresi pengeluaran pemerintah sebesar 0,017 menunjukkan bahwa jika variabel pengeluaran pemerintah meningkat satu satuan maka variabel pertumbuhan ekonomi akan mengalami peningkatan sebesar 0,017 satuan dengan ketentuan variabel lainnya.

E. Pembahasan

1. Pengaruh Investasi Swasta dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung tahun 2011-2016 secara Parsial

Pengaruh secara parsial merupakan pengaruh variabel independen secara sendiri-sendiri terhadap variabel dependen, yaitu untuk melihat pengaruh variabel investasi swasta dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung tahun 2011-2016, akan diuraikan sebagai berikut:

a. Pengaruh investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung tahun 2011-2016

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan analisis regresi menunjukkan bahwa nilai signifikan variabel investasi swasta sebesar 0,639 bila dibandingkan dengan nilai signifikansi α (0,05), menunjukkan nilai lebih besar dibandingkan nilai signifikansi ($0,639 > 0,05$) sehingga H_a ditolak dan H_o diterima, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Lampung periode 2011-2016.

Tabel 4.13
Jumlah Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) Tahun 2011-2016

| Tahun | Penanaman Modal Asing (PMA) |
|-------|-----------------------------|
| 2011 | 731.801.928 |
| 2012 | 1.063.000.000 |
| 2013 | 469.000.000 |
| 2014 | 1.643.000.000 |
| 2015 | 3.222.000.000 |
| 2016 | 1.173.000.000 |

Sumber: BPS Provinsi Lampung

Berdasarkan tabel 4.13 diatas dapat diketahui bahwa perkembangan investasi swasta (PMA) di Provinsi Lampung tahun 2011-2016 mengalami fluktuasi. Perkembangan investasi telah menjadikan terjadinya kenaikan penanaman modal atau pembentukan modal. Kenaikan penanaman modal atau pembentukan modal akan berakibat terhadap peningkatan produksi barang dan jasa di dalam perekonomian.

Namun pada periode tersebut mengalami penurunan tingkat nilai tukar mata uang asing yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Penurunan tingkat nilai tukar akan mengurangi investasi, jika nilai tukar meningkat maka investasi akan meningkat. Namun ketika terjadi depresiasi nilai tukar rupiah maka nilai riil keuntungan yang akan diperoleh akan berkurang sehingga dapat menurunkan tingkat investasi. Sehingga pada periode tersebut investasi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.

Hal ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Gabriela Brigita Desire Mosey, Rosalina Koleangan dan Richard Tumilaar yang menyatakan bahwa investasi swasta dan pengeluaran pemerintah tidak memiliki pengaruh, baik secara sendiri-sendiri (parsial) maupun secara bersama-sama (simultan) terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Minahasa Utara. Dapat dikatakan bahwa hasil ini bertolak belakang dengan teori pertumbuhan ekonomi. Seharusnya dalam perencanaan pembangunan ekonomi pada era otonomi daerah saat ini justru sangat diperlukan peran pemerintah, dalam hal ini pengeluaran pemerintah daerah seharusnya mampu merangsang bahkan memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Demikian pula peranan investasi swasta di daerah seharusnya justru menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi, sebab dengan adanya investasi yang terus meningkat setiap tahunnya semestinya pertumbuhan ekonomi juga

akan terpengaruh dan meningkat. Sebab investasi swasta juga akan menciptakan multiplier ekonomi seperti penyerapan tenaga kerja, memberikan peluang kerja baik secara langsung dengan investasi tersebut maupun secara tidak langsung.

Menurut Sukirno dalam Sayekti kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi yaitu: 1. Investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional dan kesempatan kerja, 2. Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi, 3. Investasi selalu diikuti oleh teknologi.

b. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung Tahun 2011-2016

Pengeluaran pemerintah dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Sedangkan belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada provinsi /kabupaten/kota/dan pemerintah desa serta belanja tidak

terduga. Seperti halnya pemanfaatan anggaran pendapatan daerah, anggaran belanja daerah juga dapat digunakan untuk membiayai kegiatan baik rutin maupun fisik.

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan analisis regresi menunjukkan bahwa nilai signifikan variabel pengeluaran pemerintah sebesar 0,009 bila dibandingkan dengan nilai signifikan α (0,05), menunjukkan nilai signifikan lebih kecil dibandingkan dengan nilai signifikansi ($0,009 < 0,05$) sehingga H_a diterima dan H_o ditolak, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung tahun 2011-2016.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh M. Zahari yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dimana pengeluaran pemerintah ditunjukkan untuk kegiatan pembangunan ekonomi suatu daerah sehingga dapat memberikan efek positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan teori yang di kemukakan Rostow dan Musgrave dimana dapat diketahui bahwa terdapat hubungan antara tahapan pembangunan ekonomi dengan tahapan pengeluaran pemerintah. Tahapan yang dimaksud terdiri dari 3 tahapan yaitu tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjutan.

Jadi, teori hubungan pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi yang dinyatakan oleh Rostow dan Musgrave dan penelitian yang dilakukan oleh M.Zahari dan Achmad sja'fii bahwa berlaku dengan kondisi yang terjadi di Provinsi Lampung.

Tabel 4.14
Realisasi Pengeluaran (belanja) Pemerintah Provinsi Lampung
Tahun 2011-2016

| Tahun | Pengeluaran Pemerintah |
|--------------|-------------------------------|
| 2011 | 2.566.078.806 |
| 2012 | 3.835.996.351,82 |
| 2013 | 3.884.534.953,49 |
| 2014 | 4.454.187.317,37 |
| 2015 | 4.781.202.048,88 |
| 2016 | 5.476.921.595,65 |

Sumber: *Statistik Keuangan Daerah Provinsi Lampung tahun 2011-2016 (data diolah)*

Berdasarkan tabel 4.14 diatas dapat diketahui bahwa realisasi pengeluaran pemerintah Provinsi Lampung tahun 2011-2016 trrus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sehingga pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Maka pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana lebih efektif dan efisien untuk membangun sarana dan prasarana yang menunjang pertumbuhan perekonomian daerah.

2. Pengaruh Investasi Swasta dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung Tahun 2011-2016 secara simultan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan model regresi linier berganda dimana menggunakan Uji Signifikan Simultan (Uji F) diperoleh nilai sig 0,01 lebih kecil dari nilai signifikan 0,05 sehingga dapat disimpulkan untuk menjelaskan pengaruh investasi swasta dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel X1(investasi swasta), X2 (pengeluaran pemerintah) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel Y (pertumbuhan ekonomi) di Provinsi Lampung pada tahun 2011-2016.

Selanjutnya dari hasil koefisien determinasinya diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,908 yang artinya besar pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel bebas dalam hal ini sebesar 90,8% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimaksud dalam penelitian ini.

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima yaitu investasi swasta dan pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung tahun 2011-2016.

Islam juga menjelaskan bahwasanya tingkat perekonomian yang baik apabila negara mampu mengelola sumberdaya yang ada secara baik.

Seperti yang dikatakan oleh Al-Farabi seorang filsuf islam menjelaskan didalam karya beliau yang berjudul Ara'Ahl al-Madinah al-Fadhilah (model kota idaman). Dalam kitab tersebut, beliau menulis negara ideal bagi muslim adalah negara yang mampu menyediakan berbagai kebutuhan warganya. Distribusi harta tidak akan mempunyai dampak yang signifikan kalau tidak ada kesadaran antara sesama manusia akan kesamaan hak hidup. Oleh karena itu dalam distribusi pendapatan menggunakan asumsi bahwa yang dikonsumsi dan diproduksi umat islam tidak mengandung riba, tidak mengandung kegiatan yang haram dan harta bagi konsumen dan produsen dikenai zakat.

3. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung tahun 2011-2016 dalam Perspektif Ekonomi Islam

Ekonomi islam pada dasarnya memandang bahwa pertumbuhan ekonomi adalah bagian dari pembangunan ekonomi. Menurut Khursyid pertumbuhan ekonomi tidak lepas dari konsep keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan bagi setiap individu pada seluruh generasi, menghapus riba dan mewajibkan zakat. Kemakmuran ekonomi dikaitkan dengan taraf kehidupan yang lebih baik, terutamanya dari segi penghimpunan dan kekayaan sebuah negara.

Pertumbuhan ekonomi juga dapat meningkatkan pendapatan. Sumber ekonomi yang penting adalah modal, tanah, sumber manusia, sumber tenaga, kemudahan infrastruktur dan sebagainya. Aspek pembayaran

dalam ekonomi islam , yang meliputi *zakat*, *jizyah* (pajak yang dikenakan pada non muslim sebagai imbalan untuk jaminan yang diberikan negara islam pada mereka untuk melindungi kehidupannya, harta benda, dan lain sebagainya, *kharaj* (pajak bumi), *ghanimah* (rampasan perang), dan lain sebagainya. Adapun jumlah penduduk provinsi Lampung tahun 2011-2016 sebagai berikut:

Tabel 4.15
Jumlah Penduduk Provinsi Lampung tahun 2011-2016

| Tahun | Jumlah Penduduk |
|-------|-----------------|
| 2011 | 7.691.007 |
| 2012 | 7.767.312 |
| 2013 | 7.932.132 |
| 2014 | 8.026.191 |
| 2015 | 8.117.268 |
| 2016 | 8.205.141 |
| 2017 | 8.289.577 |
| 2018 | 8.370.485 |

Sumber: BPS Provinsi Lampung

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk provinsi Lampung tahun 2011-2016 terus mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Selain itu pertumbuhan penduduk yang meningkat akan mengakibatkan melimpahnya tenaga kerja kemudian kebutuhan bagi penduduk juga ikut meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk, pemerintah harus mampu memberdayakan sumberdaya manusia yang

tinggi karena hal ini bisa menjadi potensi yang baik apabila pengelolaannya dilakukan secara efektif dan berkelanjutan.

Dalam Bidang ekonomi, zakat mencegah terjadinya penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya pada orang miskin. Zakat merupakan sumber dana yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat dapat berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin untuk dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga ia bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Zakat dapat pula mengekang laju inflasi yang disebabkan, karena peredaran mata uang yang tidak seimbang, distribusi kekayaan yang tidak merata di tengah masyarakat. Oleh karena itu, dengan pengelolaan zakat yang tepat dan produktif secara bertahap dapat menciptakan stabilitas ekonomi.

Kesadaran untuk menunaikan kewajiban zakat bagi setiap muslim merupakan kata kunci bagi terciptanya umat yang sejahtera. Hal ini karena kewajiban membayar zakat merupakan proses utama dalam sistem keuangan islam (fiskal), dan sejalan dengan prinsip distribusi dalam islam agar harta tersebar pada seluruh rakyat.

Perbedaan yang paling utama antara konsep pertumbuhan dalam ekonomi islam dan konvensional adalah terletak pada asas yang dipakai, dalam islam unsur spritualitas (agama) menjadi prioritas utama. Meskipun

prinsip pertumbuhan (ekonomi) dalam islam berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, namun ia tidak menjelaskan secara detail masalah-masalah yang menyangkut dalam pertumbuhan ekonomi islam, tetapi hanya menjelaskan secara global yang mencakup petunjuk-petunjuk pokok, kaidah-kaidah, karena masalah ekonomi termasuk masalah kemanusiaan yang dapat mengalami perubahan sesuai dengan lingkungan dan zamannya, sedangkan masalah yang bersifat teknis diselesaikan melalui upaya manusia (ijtihad) sesuai kondisi lingkungan dan zamannya.

Adapun asas-asas pertumbuhan dalam ekonomi islam ada empat yaitu:

1. Tauhid

Konsep tauhid adalah menjelaskan hubungan sesama manusia dengan Allah. Manusia harus patuh kepada Allah SWT, kepatuhan manusia kepada Allah dapat dilihat dari tingkah laku atau tindakan manusia yang mematuhi perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah dengan cara yang ikhlas dan menyeluruh.

2. Rububiyyah

Konsep yang menerangkan sifat Allah. Dia yang berkuasa membuat peraturan untuk menjamin dan membimbing kehidupan manusia agar sempurna dan sejahtera. Dia juga berkuasa untuk menjaga, mengawal, menampung dan mengurus kehidupan makhluknya ke arah kesempurnaan.

3. Khalifah

Manusia sebagai utusan Allah di muka bumi ini. Tanggung jawab utamanya ialah sebagai pemegang amanah Allah dalam segala aspek seperti akhlak, ekonomi, politik dan sosial. Asas terpenting untuk melaksanakan tugas khalifah selain daripada iman ialah ilmu. Ilmu yang dimaksudkan ialah ilmu tentang realitas fisik. Merubah kepada kedudukan ilmu tersebut berarti telah mengubah kedudukannya yang asli dan perubahan yang dilakukan menyalahi sunnatullah maka ilmu tersebut akan merusak bukan memperbaiki.

4. Tazkiyah

Tazkiyah merupakan mekanisme utama bagi mewujudkan pertumbuhan termasuk sumber daya manusia. Tazkiyah melibatkan proses penyucian dinamik yang perlu dilakukan oleh setiap umat manusia sekiranya dia mempunyai keinginan untuk maju dan sejahtera.

Keempat asas tersebut di atas merupakan pijakan utama yang mempunyai nilai etika bagi manusia dalam melakukan pembangunan dimuka bumi, karena keempat asas tersebut sudah mencakup seluruh aspek kebutuhan manusia baik materi atau spritualitas sebagai ciri khusus ekonomi yang berlandaskan ajaran syari'ah.

Nilai-nilai filosofis yang ada dalam ekonomi Islam merupakan fondasi dari munculnya prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menjadi acuan dalam seluruh aktivitas ekonomi dalam islam. Prinsip-prinsip

ekonomi islam yaitu: Tauhid, Akhlak, Keseimbangan, Kebebasan individu, Keadilan.

Adapun yang menjadi sumber pendapatan negara pada masa ini, diantaranya *zakat*, *khums min al-ghanaim* (seperlima dari harta rampasan perang), *jizyah* (pajak perorangan kaum zimmi), *kharaj* (pajak hasil pertanian), *fai*, wakaf, sedekah, dan lain sebagainya.

Pertumbuhan ekonomi dalam perspektif ekonomi islam harus memasukkan aspek nilai, moral agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya diorientasikan kepada kesejahteraan materi saja melainkan kesejahteraan dunia dan akhirat. Pertumbuhan ekonomi juga bertujuan untuk membersihkan dan menyucikan akidah dan membenarkan iman. Untuk itu, agar kehidupan yang lebih baik itu dapat tercapai maka haruslah ada sasaran yang dicapai.

Ekonomi Islam akan mempunyai arti tersendiri dalam mempertimbangkan aspek *halal* dan *haram* dalam sebuah perekonomian, ukuran kesejahteraan dalam Islam tidak hanya melihat kesejahteraan dari terpenuhinya materi atau melimpahnya materi, tetapi Islam juga melihat kesejahteraan dari nilai spritual dan kebutuhan non-materil, sehingga kemajuan ekonomi yang diharapkan adalah bukan sekedar kemajuan ekonomi secara material, tetapi juga kemajuan ekonomi yang mempunyai penekanan terhadap aspek-aspek Tauhid, Keadilan, Etika, dan Kemanusiaan sebagaimana obyektif dari syari'ah itu sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan hasil penelitian pengaruh investasi swasta dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Lampung dalam perspektif ekonomi islam dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji signifikan (uji t) secara parsial pada variabel investasi swasta tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Lampung tahun 2011-2016. Hal ini disebabkan karena pada periode tersebut mengalami penurunan nilai tukar mata uang asing, yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Penurunan nilai tukar akan mengurangi investasi. Ketika terjadi depresiasi nilai tukar rupiah maka nilai riil keuntungan yang akan diperoleh akan berkurang sehingga menurunkan tingkat investasi. Variabel Pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Lampung tahun 2011-2016 karena pengeluaran pemerintah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dimana pengeluaran pemerintah ditunjukkan untuk kegiatan pembangunan ekonomi suatu daerah sehingga dapat memberikan efek positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi.

2. Berdasarkan hasil uji penelitian dengan menggunakan regresi linier berganda, dapat dinyatakan bahwa secara simultan atau bersama-sama variable investasi swasta dan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.
3. Pertumbuhan ekonomi yang baik salah satunya yaitu bertujuan untuk memberantas kemiskinan hingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam Islam hal ini sudah ditetapkan dalam manajemen Islam yang sudah ada di dalam Al-Quran itu sendiri, Islam dan upayanya dalam mengurangi kemiskinan adalah dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan apabila umat muslim yang tidak bergerak atau dia berdiam diri dalam memerangi kemiskinan maka ancamannya adalah mereka tidak akan digolongkan sebagai orang yang beriman, yaitu masuk dalam golongan orang-orang yang mendustakan agama.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka adapun saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Kepada pemerintah provinsi Lampung diharapkan dapat lebih mempertahankan dan meningkatkan investasi swasta dan pengeluaran pemerintah yang lebih efektif. Selain itu, diperlukan penghematan dan efisiensi pengeluaran rutin perlu dilakukan yang dapat dialokasikan untuk pembangunan provinsi.

2. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebuah bahan referensi untuk kegiatan mengajarnya atau penelitiannya. Dikarenakan penelitian ini masih memiliki kekurangan seperti keterbatasan dalam memperoleh data dan periode waktu yang digunakan hanya 6 tahun. Sehingga penelitian selanjutnya diharapkan mampu meneliti dengan menambahkan variabel bebas lainnya serta menambah tahun penelitian sehingga mampu memberikan hasil penelitian yang lebih baik.
3. Bagi publik, dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan diharapkan menggunakan sebagian dananya untuk kegiatan investasi sehingga keadaan ekonomi masyarakat cenderung stabil dan meningkat selanjutnya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Yusno, *Sistim Pemikiran Islam Imam Al-Ghozali* (Jurnal Ekonomi Islam, UIN Jakarta Volume 9. Nomor 2. Mei-agustus. thn 2011)
- Aedy Hasan, *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011
- Aminah Siti, *Analisis Pengaruh Investasi Swasta dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Provinsi Jambi*, (Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol. 4 No. 2, Oktober-Desember 2016)
- Arsyad Lincolin, *Ekonomi Pembangunan*, STIE YKPN, Yogyakarta, 1999, h. 12.
A. H. M. Sadeq, *Islamic Economic*, (Lahore: Islamic Publication (Pvt) Limited, 1989)
- Asiyan Sri, *Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing, dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur*, Jurnal Fakultas Ekonomi, UNESA
- Athailah, Abubakar Hamzah, Raja Masbar, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh", *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Issn 2302-0172 Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Volume 1, No. 3 (Agustus 2013)
- Fahrika Andika Ika, *Pengaruh Tingkat Suku Bunga Melalui Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*, *Jurnal Ecces Economics, Social, And Development Studies*, Vol. 3 No. 2, Desember 2016
- Gabi Haifa Nadhira, "Teori Pembangunan Yang Sesuai Untuk Indonesia" (On-Line), tersedia di : <http://Mutosagala.Wordpress.Com/2012/03/05/230/> (di Unduh Pada 17 Maret 2018)
- Hafid, *Estimologi Al-Farabi Gagasannya Tentang Daya Daya Manusia* (Jurnal Ilmiah, UIN Jogja Volume 17. Nomor 3. Juli-Desember 2007)
- Harjono, D. K, *Hukum Penanaman Modal* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007)
- Haryanto Tommy Prio, *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011*, (journal unnes 2013)

Hasan Iqbal, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)

Huda Nurul dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015)

<http://kseirsundip.wordpress.com/2012/07/24/peran-pemerintah-dalam-ekonomi-islam/diakses> pada 30 juni 2016

<https://Muslim.Or.Id//18586-Investasi-Dan-Cara-Memanfaatkan-Modal.Html>

Iswandi Lalu Muhammad, “*Prinsip Dasar Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Islam* (jurnal lidan Al-Hal, IAI Hamzanwadi Pancor Lotim, NTB, 2013), h.367, mengutip Chapra dkk, *Pembangunan Masyarakat Islam*.

Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi Jaribah bin Ahmad, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab*, h. 506-516, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab*, h. 506-516

Juliansyah Nor, *Analisis Data Penelitian Ekonomi dan Manajemen* (Jakarta: PT. KaGrasindo, 2014)

Kamus Besar Bahasa Indonesia (on-line), tersedia di: <https://kbbi.web.id/pengaruh> (18 Januari 2018)

Katalog BPS, *PDRB Tahun 2010*

Kesuma Ni Luh Aprilia dan I made Suyana Utama, “Analisis Sektor Unggulan dan Pergeseran Pangsa Sektor-Sektor Ekonomi Kabupaten Klungkung” (E-Jurnal EP UNUD, 4(3): 169-179. ISSN: 2303-0178, Universitas Udayana, Bali, 2013)

Keterbukaan Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah”. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (Jbe)*, Vol. 21, No. 1 (Maret 2014)

Kuncoro, Mudrajad, *Ekonomi Pembangunan (Teori, Masalah, dan Kebijakan)*, UPP AMP YPKN, Yogyakarta, 1997

Lebang Lisa Irma Abigael, Debby Ch. Rotinsulu, George M.V.Kawung,”Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Bitung

Maharani Kurnia, Sri Isnowati, “Kajian Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja dan Pujoalwanto Basuki, *Perekonomian Indonesia, Tinjauan Historis, Teoritis, dan Empiris*, Yogyakarta, 2014

Mosey Gabriela Brigita Desire, Rosalina Koleangan dan Richard Tumilaar, *Pengaruh Investasi Swasta Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2004-2013*, (Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Volume 16 No. 01 Tahun 2016)

Muhammad Umar Syabira, *Nahwa Nizham Adil*, h. 114

M.Zahari MS, *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi*, (Jurnal of Economics and Bussiness, Vol. 1 No. 1 September 2017)

Noor Henry Faizal, *Ekonomi Public (ekonomi untuk kesejahteraan rakyat)*, cet. Pertama, PT. Indeks, Jakarta, 2005

P3EI, *Ekonomi Islam*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2011)

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2008

Rahayu Sri Endang, *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*, Jurnal Manajemen & Bisnis, Vol 11 No.02 Oktober 2011

Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam*, h. 98

SBM Nugroho, *Evaluasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi investasi di Indonesia dan implikasi kebijakannya*, jurnal Riptek, Vol. 2, No.1, Tahun 2008

Samuelson Paul A. & William D. Nordhus, *Ekonomi, Edisi Keduabelas*. (Jakarta:Erlangga, 1985)

Subagyo Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktif*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011

Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R & D*, Alfabeta, Bandung

Sujarweni Wiratna, *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2015

Sukirno Sadono, *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan* (Jakarta: Kencana, 2006)

Sukirno Sadono, *Makroekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)

Sukirno Sadono, *Ekonomi Pembangunan*, Edisi Kedua (Jakarta: Putra Grafika)

Sunusi Dewi Kurniawati, Anderson Kumenaung, Debby Rotinsulu, Analisis Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah Pada Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Sulawesi Utara Tahun 2001-2010, (Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Volume14 no.2-Mei2014)

Tarigan Robinson, *Ekonomi Regional Edisi Revisi*

Tim Biro Hubungan dan Studi Internasional-Bank Indonesia, *Perekonomian Asia Timur Satu Dekade Setelah Krisis* (Jakarta: Grasindo, 2015)

Todaro Michael, *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*, Erlangga, Jakarta, 2000

Undang-undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2004, *Tentang Peraturan Pemerintah Daerah*, pasal 2 ayat 2

Usman, Husaini, dan Setiadi, *Pengantar Statistika*, (PT Bumi Aksara, Jakarta, 2003)

V. Wiratna Sujarweni, *SPSS Untuk Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2015)

